

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KAB. BENGKALIS



RENSTRA 2021-2026

**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis merupakan dokumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis berisi upaya-upaya pembangunan kesehatan yang dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan, indikator, target, sampai dengan kerangka pendanaan dan kerangka regulasinya yang telah dilakukan indikator dan program prioritas serta strategis.

Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan dalam kurun waktu tahun 2021-2026 serta dilaksanakan oleh seluruh jajaran kesehatan di Kabupaten. Selanjutnya Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 dijabarkan dalam bentuk Rencana Aksi Program di tingkat Eselon III dan Rencana Aksi Kegiatan di tingkat Eselon IV serta ditetapkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja pada tiap tahapan pelaksanaan.

Saya mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026. Pada kesempatan ini pula saya mengajak kepada semua pihak untuk saling bersinergi dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan guna tercapainya sasaran pembangunan kesehatan.

Semoga Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026 ini mendapatkan ridha dari Tuhan Yang Maha Esa. Amiin.

Bengkalis, Maret 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BENGKALIS,



Dr. ERSAN SAHPUTRA, TH
Pembina Tingkat I

NIP.19740220 200312 1 007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	Hal	
Daftar Isi	i	
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS NOMOR /Kpts/2019 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN NOMOR 280/Kpts/2017 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016-2021.	ii	
BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasam Hukum	4
1.3	Maksud dan Tujuan	6
1.4	Sistematika Penulisan	7
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN	
2.1	Tugas, Fungsi dan Stuktur Organisasi	9
2.2	Sumber Daya Kesehatan	34
2.3	Kinerja Pelayanan Kesehatan	36
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	53
2.5	Analisis Sasaran Renstra Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Riau dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis	62
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan	65
3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis	68
3.3	Telaahan Renstra Kementrian Kesehatan RI, Dinas Kesehatan Provinsi Riau	
3.4	Penentuan Isu – Isu Strategis	71
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	
4.1	Visi dan Misi	81
4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kesehatan	85
BAB V	STATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1	Strategis	96
5.2	Arah dan Kebijakan	97
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	96
6.2	Rincian Rencana Program Prioritas RPJMD	97
6.1	Rincian Rencana Program Prioritas Organisasi Perangkat Daerah	124

BAB VII	INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.	
7.1	Indikator Kinerja Mengacu Tujuan dan Sasaran	129
7.2	Indikator Kinerja Renstra Mengacu Pada Tugas Fungsi Dinas Kesehatan	132
7.3	Indikator Kinerja Utama	138
BAB VIII	PENUTUP	142

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu dan disusun berdasarkan pemahaman lingkungan strategik baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan taktis – strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan untuk memecahkan permasalahan daerah secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD setempat dengan mengutamakan kewenangan yang wajib disusun sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Disamping itu rencana strategis memuat Visi dan Misi sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijakan dan prioritas sasaran sampai dengan berakhirnya masa perencanaan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah dapat dikategorikan sebagai dokumen manajerial wilayah yang bersifat komprehensif karena mampu memberikan program-program strategis sesuai dengan kebutuhan masing- masing bidang dalam lingkup Perangkat Daerah. Keberhasilan usaha pemerintah daerah untuk mempertemukan antara keinginan masyarakat dengan fakta kondisi daerah diukur melalui indikator perencanaan strategis dari program dan kegiatan yang tercantum di dalam Renstra Perangkat Daerah dievaluasi melalui evaluasi kinerja Kepala Daerah sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2007 dan PP Nomor 8 Tahun 2008 yang berpedoman pada Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

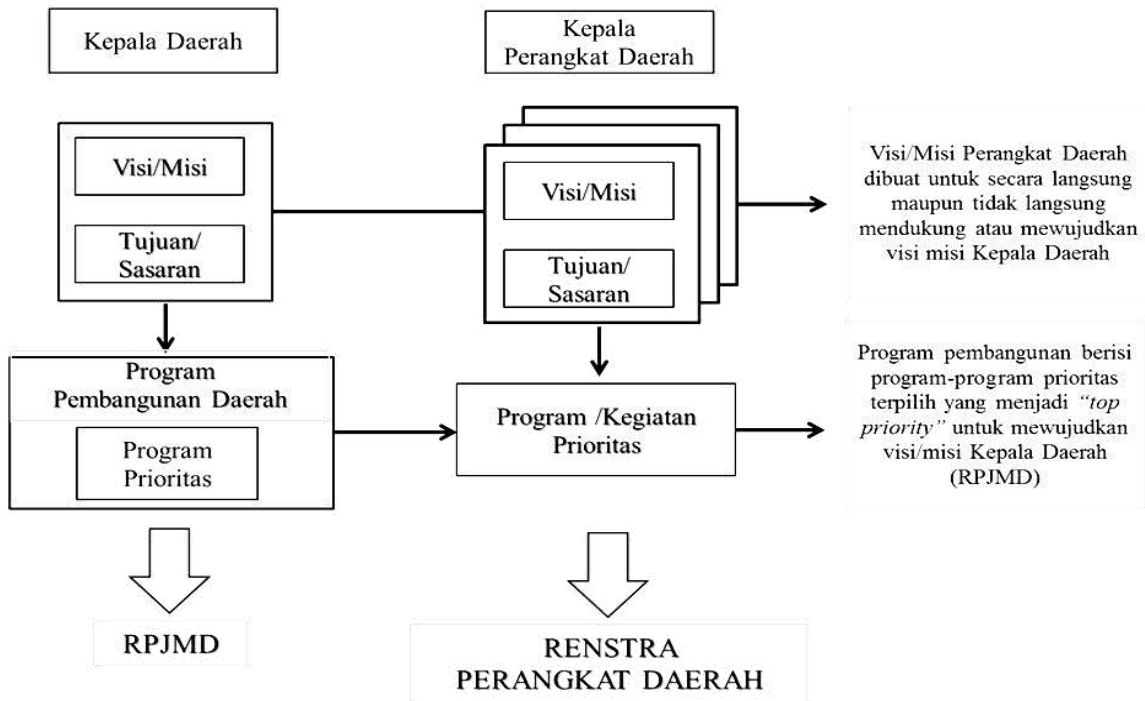
Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota untuk menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai salah satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut disusun berjangka, meliputi :

- a. Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun yang memuat Visi, Misi dan arah Pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun, yang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dengan berpedoman RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional.
- c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu satu tahun.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, Dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis juga sangat terkait dengan berbagai dokumen perencanaan di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten seperti : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015), Renstra Kementerian Kesehatan RI Tahun 2020-2024 (Kepmenkes RI No.HK.02.02/Menkes/512/2015), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau 2014-2019 (Perda Nomor 7 Tahun 2014), Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkalis 2005-2025

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-program pembangunan kesehatan di Kabupaten Bengkalis yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis maupun dengan mendorong peran aktif masyarakat untuk kurun waktu tahun 2021 – 2026. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis ini dipergunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 2026 seperti pada Gambar 1.2

Gambar 1. 1
Keterhubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 2026 ini tetap mengacu pada UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Oleh karenanya lima pendekatan perencanaan yang dipergunakan dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis adalah: (1) pendekatan politik, (2) pendekatan teknokratik, (3) pendekatan partisipatif, (4) pendekatan atas- bawah (*top-down*), dan (5) pendekatan bawah-atas (*bottom-up*). Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis memberikan penekanan pada pencapaian sasaran Visi Kabupaten Bengkalis 2021 – 2026, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bengkalis.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 2021 – 2026 ini dilakukan dengan melandaskan diri pada sejumlah aturan perundangan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016–2021 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 11)
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 38).

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 2026 adalah :

1. Pedoman bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis dalam menyusun program dan kegiatan dalam Pembangunan Kesehatan selama lima tahun kedepan;
2. Untuk menyesuaikan arah kebijakan, tujuan, sasaran, program dan kegiatan prioritas Dinas Kesehatan dalam perencanaan jangka menengah;
3. Untuk menjadi dasar dalam penilaian kinerja yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang transparan dan akuntabel.

Tujuan dilakukannya Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis adalah

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar pelaku pembangunan bidang kesehatan.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021– 2026 adalah merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya yang merupakan penjabaran lebih lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 2026 urusan kesehatan sehingga Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis ini menjadi penting karena dalam masa lima tahun tersebut, Organisasi Perangkat Daerah berkewajiban untuk

mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai perencanaan ini. Selain itu urgensi penyusunan Renstra Perangkat Daerah ini adalah :

1. Sebagai acuan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahunan sehingga perencanaannya lebih terarah.
2. Sebagai media akuntabilitas dalam rangka menciptakan Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance).
3. Agar terjaminnya sinergitas, sinkronisasi dan integritas Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2021 – 2026.

Disamping itu Renstra Perangkat Daerah dapat dijadikan bahan evaluasi yang penting agar pembangunan berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah mendasar yang dihadapi Kabupaten Bengkalis khususnya di bidang kesehatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN.

Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra dan Sistematika Penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN

Bab ini menguraikan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini menjelaskan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan, Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati, Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan RI, Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Telaahan Rencana Tata Ruang wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tentang Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Kesehatan.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN dan PENDANAAN

Bab ini berisi tentang Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Indikatif Pendanaan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS KESEHATAN

Bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Bab ini diuraikan Penetapan Indikator Kinerja Utama.

BAB VIII PENUTUP.

Bab ini merupakan bagian penutup dari keseluruhan dari penyusunan Renstra Dinas Kesehatan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN

2.1. Tugas dan Fungsi

Dinas Kesehatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan memiliki tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis memiliki uraian tugas sebagai berikut :

2.1.1. Kepala, mempunyai tugas ;

Kepala mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kesehatan;

Kepala dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi;

- a) Perumusan kebijakan daerah dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
- b) Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
- c) Pengkoordinasian penyedia infrastruktur dan pendukung di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan

dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;

- d) Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
- e) Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan
- f) Pelaksanaan administrasi Dinas Kesehatan; dan
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2.1.2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan, pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian, perencanaan, penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, perlengkapan, umum dan kepegawaian.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a) Penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan;
- b) Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan rumah tangga Dinas Kesehatan;
- c) Pelaksanaan administrasi keuangan dan perlengkapan serta penataan aset;
- d) Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi dan hubungan masyarakat;
- e) Pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat;
- f) Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan

- g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.1.3. Bidang Kesehatan Masyarakat

1. Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Kesehatan Masyarakat yang meliputi Kesehatan Keluarga, Gizi Masyarakat, Promosi Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga;
2. Bidang Kesehatan Masyarakat dalam menjalankan tugas pokok dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi;
 - a) Merumuskan kebijakan teknis dan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
 - b) Melaksanakan kebijakan teknis dan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
 - c) kebijakan di bidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
 - d) Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;

- e) Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
- f) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

2.1.4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

1. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam menjalankan tugas pokok dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a) Merumuskan dan pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans epidemiologi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);
 - b) Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang surveilans epidemiologi,

pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya(NAPZA);

- c) Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans epidemiologi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);
- d) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang surveilans, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

2.1.5. Bidang Pelayanan Kesehatan

1. Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan dibidang Pelayanan Kesehatan yang meliputi Pelayanan Kesehatan dibidang Kesehatan Primer, Kesehatan Rujukan, dan Kesehatan Komplementer/ Penunjang.

2. Bidang Pelayanan Kesehatan dalam menjalankan tugas pokok dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a) Merumuskan kebijakan di bidang peningkatan pelayanan dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, dan komplementer/penunjang;
 - b) Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan pelayanan dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, dan komplementer/ penunjang;
 - c) Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan pelayanan dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, dan komplementer/ penunjang;
 - d) Melakkan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan pelayanan dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, dan komplementer/ penunjang;
 - e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.6. Bidang Sumber Daya Kesehatan

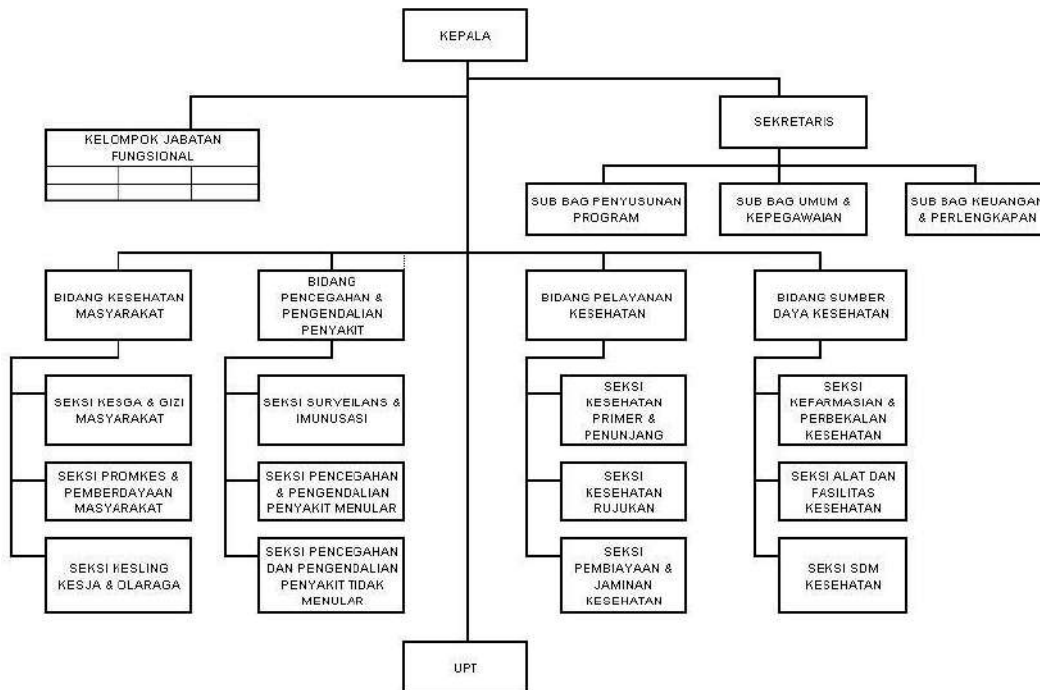
1. Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan termasuk penerbitan izin praktek dan izin kerja tenaga kesehatan.
2. Bidang Sumber Daya Kesehatan dalam menjalankan tugas pokok dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a) Menyusun kebijakan teknis di bidang perencanaan, pendayagunaan, peningkatan kompetensi dan pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan, produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat dan fasilitas pelayanan kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan dan pelayanan kefarmasian;
- b) Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, pendayagunaan, peningkatan kompetensi dan pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan, produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat dan fasilitas pelayanan kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan dan pelayanan kefarmasian;
- c) Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pendayagunaan, peningkatan kompetensi dan pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan, produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat dan fasilitas pelayanan kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan dan pelayanan kefarmasian;

- d) Melakukan pemantauan, evaluasi, dan di bidang perencanaan, pendayagunaan, peningkatan kompetensi dan pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan, produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat dan fasilitas pelayanan kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan dan pelayanan kefarmasian;
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu, pada gambar 2.1

Gambar 2.1
Struktur Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu



Sumber : Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 38 Tahun 2016

2.2. Sumber Daya Dinas Kesehatan

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam bentuk program dan kegiatan kesehatan berpengaruh besar dari ketersediaan fasilitas dan sumberdaya kesehatan, meliputi tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes), baik sarana dan peralatan kesehatan serta sarana penunjang dan pembiayaan kesehatan.

1. Tenaga Kesehatan Berdasarkan Umur

Jumlah tenaga kesehatan dengan status Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan golongan umur pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Tenaga Kesehatan Berdasarkan Umur

No		20-25	20-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	Jml
1	Sekretariat	0	0	2	6	2	3	4	17
2	Bidang Yankes	0	0	4	3	2	0	2	11
3	Bidang SDK	2	2	2	3	3	2	3	17
4	Bidang Kesmas		2	1	5	4		1	13
5	Bidang P2P		1	3	1	2	2		9
6	UPT Pusk Bengkalis	1	6	20	23	21	4	4	79
7	UPT Pusk Pematang Duku		2	10	2	1	2	3	20
8	UPT Pusk Selat Baru		1	15	19	9	4	5	53
9	UPT Pusk Teluk Pambang		4	6	4	3			17
10	UPT Pusk Sungai Pakning	1	3	6	20	11	5	5	51
11	UPT Pusk Tenggayun	1	3	7	2	6	3	1	23
12	UPT Pusk Lubuk Muda		8	12	16	6	1	2	45
13	UPT Pusk Sadar Jaya		2	12	4	2	1	1	22
14	UPT Pusk Duri Kota	1	1	8	6	7	8	10	41
15	UPT Pusk Pematang Pudu		6	8	3	7		2	26
16	UPT Pusk Balai Makam		2	9	15	10	5	5	46
17	UPT Pusk Sebangar		1	7	10	10	3	1	32
18	UPT Pusk Pinggir			3	8	11	8	6	36
19	UPT Pusk Muara Basung	2	2	6	5	10	8	1	34
20	UPT Pusk Serai Wangi		6	8	5	3		1	23
21	UPT Pusk Batu Panjang	3	2	9	7	13	5	3	42
22	UPT Pusk Teluk Lecah		6	6	3	2			17
23	UPT Pusk Tanjung Medang		4	7	5	5	2	3	26

Sumber : Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021

2. Tenaga Kesehatan Berdasarkan Golongan Jabatan

Jumlah tenaga Dinas Kesehatan menurut golongan jabatan sebagai berikut ;

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Menurut Golongan Jabatan

No	UNIT WILAYAH	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	0	7	7	3	17
2	Bidang Yankes	0	2	7	2	11
3	Bidang SDK	0	10	7	0	17
4	Bidang Kesmas	0	1	11	1	13
5	Bidang P2P	0	2	7	0	9
6	UPT Pusk Bengkalis	1	18	53	7	79
7	UPT Pusk Pematang Duku	0	9	11	0	20
8	UPT Pusk Selat Baru	0	17	33	3	53
9	UPT Pusk Teluk Pambang	0	5	12	0	17
10	UPT Pusk Sungai Pakning	0	16	30	5	51
11	UPT Pusk Tenggayun	0	10	13	0	23
12	UPT Pusk Lubuk Muda	1	13	31	0	45
13	UPT Pusk Sadar Jaya	0	11	10	1	22
14	UPT Pusk Duri Kota	0	8	29	4	41
15	UPT Pusk Pematang Pudu	0	10	14	2	26
16	UPT Pusk Balai Makam	0	5	35	6	46
17	UPT Pusk Sebangar	0	10	21	1	32
18	UPT Pusk Pinggir	0	5	27	4	36
19	UPT Pusk Muara Basung	1	14	15	4	34
20	UPT Pusk Serai Wangi	0	15	8	0	23
21	UPT Pusk Batu Panjang	0	15	25	2	42
22	UPT Pusk Teluk Lecah	0	9	8	0	17
23	UPT Pusk Tanjung Medang	0	9	16	1	26

Sumber : Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021

3. Tenaga Kesehatan Menurut Pendidikan

Jumlah tenaga Dinas Kesehatan menurut Pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan

No	UNIT WILAYAH	PENDIDIKAN					JUMLAH
		SMP	SMA	DIPLOMA	S1	S2	
1	Sekretariat	0	9	2	4	2	17
2	Bidang Yankes	0	0	3	5	3	11
3	Bidang SDK	1	4	8	4	0	17
4	Bidang Kesmas	0	1	2	9	1	13
5	Bidang P2P	0	1	1	7	0	9
6	UPT Pusk Bengkalis	1	2	49	27	0	79
7	UPT Pusk Pematang Duku	0	2	12	6	0	20
8	UPT Pusk Selat Baru	0	6	34	13	0	53
9	UPT Pusk Teluk Pambang	0	0	11	6	0	17
10	UPT Pusk Sungai Pakning	5	29	15	2	0	51
11	UPT Pusk Tenggayun	0	0	13	10	0	23
12	UPT Pusk Lubuk Muda	1	0	30	14	0	45
13	UPT Pusk Sadar Jaya	0	1	12	9	0	22
14	UPT Pusk Duri Kota	0	4	22	15	0	41
15	UPT Pusk Pematang Pudu	0	1	14	11	0	26
16	UPT Pusk Balai Makam	0	2	21	23	0	46
17	UPT Pusk Sebangar	0	2	20	10	0	32
18	UPT Pusk Pinggir	0	4	24	8	0	36
19	UPT Pusk Muara Basung	1	7	17	8	1	34
20	UPT Pusk Serai Wangi	0	1	17	5	0	23
21	UPT Pusk Batu Panjang	1	7	25	9	0	42
22	UPT Pusk Teluk Lecah	0	0	11	6	0	17
23	UPT Pusk Tanjung Medang	0	3	14	9	0	26

Sumber : Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021

4. Tenaga Kesehatan Menurut Pendidikan

Jumlah tenaga Dinas Kesehatan menurut Peta Jabatan sebagai berikut :

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Menurut Peta Jabatan

No	Jabatan	Jumlah	Satuan
a	Eselon IIB	1	Orang
b	Eselon IIIa	1	Orang
c	Eselon IIIb	4	Orang
d	Eselon IVb	31	Orang
e	Fungsional tertentu\	593	Orang
.	Fungsional Pelaksana	70	
	Jumlah	700	Orang

Sumber : Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021

5. Sarana dan Fasilitas Kesehatan

Jumlah Sarana dan Prasarana yang mendukung program-program kesehatan antara lain :

Tabel 2.5
Jumlah Sarana dan Prasarana yang mendukung program-program kesehatan

No	JENIS ASET	STATUS			JUMLAH
		BAIK	SEDANG	RUSAK BERAT	
1	Rumah Sakit Pemerintah	2			2
2	Rumah Sakit Swasta	5			5
3	Puskesmas	18			18
4	Puskesmas Pembantu	56			56
5	Puskesmas Keliling			1	1
6	Mobil Ambulan	111			111
7	Puskesmas Keliling Air	0	0	0	0
8	Poskesdes	58			58
9	Polindes	25			25
10	Posyandu	511			511
11	Polansia	130			130
12	Posbinde PTM	155			155

Sumber : SDK Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021

6. Tenaga Kesehatan Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Jumlah tenaga Dinas Kesehatan menurut Jenis Kelamin dan jabatan sebagai berikut :

Tabel 2.4

Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

No	UNIT WILAYAH	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Sekretariat	7	10	17
2	Bidang Yankes	9	2	11
3	Bidang SDK	9	8	17
4	Bidang Kesmas	11	2	13
5	Bidang P2P	6	3	9
6	UPT Pusk Bengkalis	76	3	79
7	UPT Pusk Pematang Duku	15	5	20
8	UPT Pusk Selat Baru	37	16	53
9	UPT Pusk Teluk Pambang	10	7	17
10	UPT Pusk Sungai Pakning	45	6	51
11	UPT Pusk Tenggayun	18	5	23
12	UPT Pusk Lubuk Muda	39	6	45
13	UPT Pusk Sadar Jaya	13	9	22
14	UPT Pusk Duri Kota	38	3	41
15	UPT Pusk Pematang Pudu	23	3	26
16	UPT Pusk Balai Makam	42	4	46
17	UPT Pusk Sebangar	31	1	32
18	UPT Pusk Pinggir	33	3	36
19	UPT Pusk Muara Basung	27	7	34
20	UPT Pusk Serai Wangi	18	5	23
21	UPT Pusk Batu Panjang	34	8	42
22	UPT Pusk Teluk Lecah	11	6	17
23	UPT Pusk Tanjung Medang	18	8	26

Sumber : Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021

2.3. Kinerja Pelayanan Kesehatan

Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah khususnya dalam pelayanan pada masyarakat di bidang Kesehatan . Penyelenggaraan Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis kepada masyarakat pada dasarnya untuk memberikan pelayanan yang disesuaikan dengan berbagai aspek pelayanan umum dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD.

Capaian pelayanan SKPD berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan indikator RPJMD Kabupaten Bengkalis dan Renstra SKPD Tahun 2016 – 2020 sebagai berikut ;

Tabel 2.3.1
Capaian dan Realisasi Program Kesehatan
Renstra SKPD Tahun 2016 – 2020

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	TARGET RENSTRA					REALISASI CAPAIAN TAHUNAN				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Program Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	90%	91%	92%	93%	94%	90%	55%	100%	51%	100%
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur	70%	75%	80%	85%	90%	70%	80%	90%	90%	90%
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	85%	87%	89%	90%	91%	85%	100%	89%	87%	91%
7	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	90%	92%	94%	95%	97%	78%	90%	90%	90%	90%

8	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	65%	70%	75%	60%	85%	65%	70%	70%	80%	90%
9	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
10	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	55%	60%	65%	70%	75%	55%	60%	65%	70%	75%
11	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	90%	90%	92%	94%	96%	75%	90%	90%	94%	96%
12	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	75	80	85	90	95	75	80	85	90	95
13	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	75	80	85	90	95	75	80	85	90	95
14	Program Pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
15	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	42	45	48	51	54	42	45	48	51	54
16	Program Peningkatan pelayanan kesehatan Lansia	75	80	85	90	95	46	80	-	-	95
17	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	-	-	-	-	30	-	-	-	-	30
18	Program Peningkatan Kesehatan Ibu melahirkan dan anak	90	91	93	95	97	90	91	93	95	97

Sumber : Perencanaan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021

Berdasarkan UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 171 pembiayaan kesehatan berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Swasta. Alokasi APBN 5% dan APBD 10% diprioritaskan untuk pelayanan publik yang sekurang-kurangnya 2/3 dari anggaran kesehatan APBN dan APBD. Pada Pasal 172 ayat 3 dijelaskan alokasi pembiayaan kesehatan pada Pasal 171 untuk pelayanan publik terutama bagi penduduk miskin, kelompok lansia, dan anak terlantar. Pembiayaan Kesehatan di Kabupaten Bengkalis, sebetulnya masih kurang dari target anggaran APBN dan APBD. Pencapaian prosentase penentuan pembiayaan sesuai Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan belum mencapai 10%.

Anggaran kesehatan yang terealisasi saat ini cukup memadai untuk kebutuhan peningkatan kesehatan di Kabupaten Bengkalis yang masih memerlukan upaya kuratif yang lebih tinggi, sehubungan dengan jumlah masyarakat miskin yang semakin bertambah dan meningkatnya penyakit degeneratif atau penyakit tak menular dengan bertambahnya usia harapan hidup. Namun sesuai dengan peningkatan kesehatan masyarakat dan meningkatnya usia harapan hidup manusia di Kabupaten Bengkalis, diharapkan kendali pembiayaan diikuti kepada berkurangnya realisasi anggaran untuk kuratif dan rehabilitatif dan diikuti realisasi pembiayaan promotif dan preventif yang seimbang.

Capaian Kinerja Anggaran SKPD berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan indikator RPJMD Kabupaten Bengkalis dan Renstra SKPD Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut

Tabel 2.3.2
Pencapaian Kinerja Anggaran Dinas Kesehatan
Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2020

No	URAIAN	Tahun Anggaran					Realisasi Anggaran				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,499,213,380	8,415,266,056	6,887,833,600	7,115,719,400	5,477,952,358	2,118,431,000	8,413,118,397	6,467,922,000	5,349,765,792	5,101,958,405
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	501,640,000	1,666,602,000	1,404,096,000	4,626,505,000	1,770,252,131	474,223,000	1,650,611,478	1,394,169,000	4,739,386,109	1,763,058,370
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	50,000,000	113,390,000	131,210,000	296,210,000	103,212,000	39,540,000	84,830,000	126,009,000	252,919,000	98,129,235
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur	30,000,000	732,928,893	132,500,000	465,000,000	47,167,800	29,224,000	275,893,600	150,702,000	372,922,310	47,167,800
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	247,716,500	245,539,802	92,980,000	645,217,000	263,120,000	127,859,000	192,802,320	84,200,000	304,344,500	219,844,000
6	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	2,910,073,318	7,041,356,200	2,936,130,000	6,080,177,000	3,597,875,624	215,054,000	906,545,450	2,864,208,000	3,827,426,810	3,531,449,421
7	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	63,153,799,131	34,855,641,327	55,950,375,633	44,684,557,487	52,954,947,478	56,419,339,000	29,569,134,879	46,947,333,000	33,368,436,182	43,886,650,072

No	URAIAN	Tahun Anggaran					Realisasi Anggaran				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
8	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	139,781,800	568,321,512	215,110,000	157,414,569	419,012,500	134,124,000	395,272,000	214,570,000	157,390,000	248,721,000
9	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1,388,040,000	975,807,897	301,977,000	1,145,000,000	434,251,800	113,076,000	222,355,500	270,672,000	1,518,302,800	333,306,500
10	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	900,000,000	906,006,072	216,080,000	307,070,000	107,990,000	821,820,000	341,631,452	201,745,000	272,700,000	106,870,000
11	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	6,616,336,480	4,030,654,029	2,206,341,500	2,781,192,265	1,669,207,600	4,605,148,000	1,724,344,980	1,865,521,000	3,015,383,475	1,714,299,100
12	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	466,542,900	1,397,634,432	1,314,050,000	2,125,114,000	1,375,278,700	372,904,000	785,072,725	1,246,440,000	324,910,800	237,610,000
13	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	8,763,015,053	9,453,776,000	23,103,762,050	31,334,089,768	27,101,810,179	8,438,887,000	2,771,336,240	19,990,334,000	27,128,481,033	23,811,751,952

No	URAIAN	Tahun Anggaran					Realisasi Anggaran				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
14	Program Pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	15,072,000	2,455,128,000	585,920,000	1,694,962,000	20,000,000	12,900,000	65,790,000	17,945,000	240,040,000	19,950,000
15	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	150,000,000	52,592,668	31,900,000	180,120,000	44,840,000	139,764,000	45,272,660	31,900,000	175,850,000	44,540,000
16	Program Peningkatan pelayanan kesehatan Lansia	207,299,060	96,340,000	-	-	31,760,000	102,465,000	85,970,000	-	-	31,760,000
17	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular				-	221,574,000					195,840,000
18	Program Peningkatan Kesehatan Ibu melahirkan dan anak	4,367,232,000	5,646,985,400	5,184,082,000	4,619,491,000	133,690,500	611,793,000	1,378,365,200	121,080,000	253,491,000	86,343,500

1.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis.

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Kesehatan semakin kompleks. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas Kesehatan menuntut peningkatan peran dan kapasitas Dinas Kesehatan dan jajarannya dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat semakin lebih baik lagi.

Secara garis besar lingkungan strategis bersifat eksternal yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis terdiri atas 2 (dua) isu yaitu kesehatan dan globalisasi. Isu kesehatan adalah Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Sedangkan terkait globalisasi adanya iklim, demografi, dan Sustainable Development Goals dimana isu-isu tersebut saling terkait satu dengan lainnya.

Adapun Tantangan dan Peluang yang mempengaruhi peran Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis baik internal maupun eksternal adalah sebagai berikut :

2.4.1.1. Tantangan

- 1) Koordinasi antar Dinas terkait belum memadai;
Masih terdapatnya kendala dalam proses koordinasi dengan dinas terkait, hal ini bisa menjadi hambatan untuk pencapaian tujuan kegiatan
- 2) Adanya Pandemi COVID-19
Kondisi pandemi covid-19 masih berlanjut disebabkan penanganan pandemi yang belum optimal
- 3) Adanya masyarakat yang belum mendukung PHBS
Perilaku hidup dan bersih adalah upaya promotif dan preventif yang mempunyai peran penting dalam keberhasilan program kesehatan
- 4) Adanya masyarakat yang belum mempunyai jaminan kesehatan
Sdanya

2.4.2. Peluang

- 1) Komitmen Kepala Daerah;
Kepala Daerah sangat berkomitmen untuk melakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan kesehatan
- 2) Tersedianya regulasi di bidang kesehatan
Pelayanan kesehatan adalah pelayanan yang sangat krusial sehingga perlu adanya peraturan perundang-undangnya sangat memadai
- 3) Adanya dukungan legislatif dalam hal dukungan penganggaran dan regulasi;
Peran legislatif sangat penting dalam hal dukungan perencanaan, regulasi dan penganggaran pembangunan kesehatan
- 4) Penggunaan teknologi informasi yang memadai dan modern.
Sistem informasi sangat dibutuhkan dalam manajemen perkantoran modern dalam menjalankan aktivitasnya, seperti mengolah data-data kesehatan sehingga menjadi informasi yang lebih berguna.
- 5) Kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu
Masyarakat semakin memahami dan menuntut akan kebutuhan pelayanan kesehatan yang bermutu

Berdasarkan analisa SWOT, maka dapat kita tentukan alternatif strategi yang akan dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis antara lain :

Gambar 2.4.1
Analisa SWOT

<p style="text-align: center;">Faktor Eksternal</p> <p style="text-align: center;">Faktor Internal</p>	<p>Peluang (O) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen Kepala Daerah 2. Tersedianya regulasi di bidang kesehatan 3. Adanya dukungan legislatif dalam hal dukungan penganggaran dan regulasi 4. Penggunaan teknologi informasi yang memadai dan modern. 5. Kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu 	<p>Tantangan (T):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi antar Dinas terkait belum memadai 2. Adanya Pandemi Covid-19 3. Adanya masyarakat yang belum mendukung PHBS 4. Adanya masyarakat yg belum mempunyai jaminan
<p>Kekuatan (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dukungan pembiayaan insentif bagi nakes 2. Adanya SOP untuk mendukung organisasi 3. Adanya koordinasi dan kekompakan tim internal 4. Adanya Program JKN 	<p>Alternatif Strategi (S-O):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan dukungan kepala daerah dan legislatif dalam pemberian insentif bagi nakes 2. Peningkatan dukungan Pimpinan dalam penerapan SOP dalam pelayanan kesehatan 	<p>Alternatif Strategi (S-T):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan dan penegakkan SOP dalam penanganan COVID-19\ 2. Peningkatan bimtek dan monev dalam penanganan covid-19 3. Peningkatan promosi kesehatan 4. Pemberlakuan jaminan bagi semua (total Coverage)
<p>Kelemahan (W):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOTK yang belum sesuai dengan kebutuhan dan regulasi 2. . Belum terpadu dan terintegrasinya data kesehatan 3. Belum meratanya sarana dan prasarana kesehatan 4. Adanya disparitas kuantitas kualitas dan sebaran SDM Kesehata 	<p>Alternatif Strategi (W-O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaiki SOTK 2. Berjalannya sistem Data terpadu kesehatan 3. Dukungan pimpinan dalam Penempatan tenaga sesuai dengan kebutuhan 4. Perekrutan tenaga medis PTT 5. Dukungan pimpinan dalam pembangunan sarana prasarana kesehatan 	<p>Alternatif Strategi (W-T):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan koordinasi 2. Peningkatan advocacy dan sosialisasi

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Derajat Kesehatan masyarakat memberikan sumbangan yang nyata dalam meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi era globalisasi. Pembangunan kesehatan perlu diupayakan dan diperjuangkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat dan seluruh komponen bangsa di pusat dan daerah.

Penyusunan rencana pembangunan kesehatan dimaksudkan agar program pelayanan kesehatan selaras dengan pembangunan lingkungan dan perilaku pola hidup sehat. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan adalah kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan pada lima tahun mendatang.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang telah dicapai dengan yang direncanakan serta antara “apa” yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/ kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu.

Identifikasi permasalahan kesehatan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan pada Dinas Kesehatan antara lain ;

Tebal 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan Kesehatan

1) Bidang Pelayanan Kesehatan

ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN
Belum Baiknya Mutu Pelayanan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none">1. Belum BLUD nya semua Puskesmas.2. Belum semua Puskesmas Terakreditasi.3. Pelaksanaan Instrumen PIS-PK belum optimal.4. Belum Optimalnya pengembangan pelayanan kesehatan tradisional.5. Belum terintegrasinya pelayanan SIMRS dengan aplikasi rujukan BPJS.6. Regulasi Peraturan tentang klasifikasi dan perizinan RS type C dan D yang berubah-ubah.7. Belum baiknya fasilitas pelayanan kesehatan tingkat rujukan.8. Belum optimalnya keterpaduan dalam penanganan kegawatdaruratan.9. Belum meratanya akses pelayanan kesehatan di masyarakat
Belum Semuanya Masyarakat Memiliki Jaminan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none">1. Belum maksimalnya analisa kepesertaan JKN2. Belum optimalnya sosialisasi terkait jaminan kesehatan ke masyarakat

2) Bidang Kesehatan Masyarakat

ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN
Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya pengetahuan dan kompetensi tenaga bidan. 2. Masih adanya persalinan yang ditolong oleh dukun bayi. 3. Kurang optimalnya kegiatan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K). 4. Terbatasnya Unit Tranfusi Darah (UTD) 5. Rendahnya pelayanan kespro catin.
Tingginya Angka Kematian Bayi (AKB)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kualitas tatalaksana kegawatdarutan neonates. 2. Rendahnya cakupan pelayanan kesehatan bayi.
Masih Rendahnya derajat kesehatan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di tingkat UKK dan UKBM. 2. Kurangnya kesadaran bagi masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). 3. Belum Optimal Pelaksanaan Program STBM. 4. Belum tercapainya pemeriksaan kualitas air minum layak sesuai standar. 5. Belum tercapainya target indikator Kabupaten Sehat. 6. Masih banyaknya Tempat Pengolahan Makanan yang tidak bersertifikat. 7. Masih rendahnya cakupan pelayanan kesehatan lansia. 8. Belum optimal Program Promosi Kesehatan Masyarakat
Masih Adanya Gizi Kurang, Buruk dan Balita Stauting.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya cakupan pelayanan kesehatan balita. 2. Rendahnya cakupan Asi Eksklusif. 3. Kurangnya Sarana dan Prasarana di Posyandu. 4. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang gizi baik dan seimbang.

3) Bidang Sumber Daya Kesehatan

ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN
Belum baiknya manajemen SDM Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dan Jenis SDM Kesehatan Belum Sesuai dengan Kebutuhan. 2. Distribusi SDM Kesehatan Belum Merata 3. Peningkatan kapasitas dan keterampilan tenaga kesehatan yang kurang optimal
Belum meratanya akses pelayanan kesehatan sesuai standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terpenuhinya bangunan Puskesmas/puskesmas pembantu/Pokesdes sesuai standar. 2. Belum terpenuhinya prasarana Puskesmas/puskesmas pembantu/Pokesdes sesuai standar. 3. Belum terpenuhinya alat kesehatan di Puskesmas/jaringannya sesuai standar. 4. Belum terpenuhinya Mobil Ambulan Darat dan Laut serta Kendaraan operasional program di Puskesmas sesuai standar. 5. Belum tersedianya Laboratorium Kesehatan di Kabupaten. 6. Belum terpenuhinya Rumah Sakit Pratama di Daerah Terpencil dan Terpencil dan Perbatasan. 7. Belum terpenuhinya IPAL di Puskesmas sesuai standar (hanya 2 pus). 8. Belum terpenuhinya tempat penampungan limbah sementara di Puskesmas 9. Belum terpenuhinya pencatatan dan pemeriharaan alat kesehatan di Puskesmas/jaringannya sesuai standar. 10. Belum terpenuhinya kalibrasi alat kesehatan di Puskesmas dan jaringannya. 11. Pengadaan tanah untuk bangunan kesehatan.
Belum baiknya sistem manajemen obat dan PHP yang baik dan benar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terpenuhinya bahan habis pakai di Puskesmas/jaringannya. 2. Belum adanya kesesuaian antara perencanaan, kebutuhan dan pengadaan obat.

4) Bidang Bidang Pemberantasan Penyakit Menular.

ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN
Belum Optimalnya Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya penemuan dan Pengobatan Penderita TB Paru. 2. Belum optimalnya penemuan kasus dan Surveilans Kasus HIV. 3. Masih Tingginya Insiden Rate (IR) Kasus DBD, ISPA (Pneulonia), Hepatitis pada Ibu Hamil, Diare pada Balita, Kecacingan pada anaks sekolah, 4. Masih ada ditemukan kasus Malaria dan Filariasis 5. Ketersediaan Logistik untuk program penyakit menular dan tidak menular masih terbatas. 6. Masih ada penderita Kusta yang putus berobat. 7. Belum optimalnya pelaksanaan Triple Eliminasi (pemeriksaan HIV, IMS dan Hepatitis) pada Ibu Hamil. 8. Masih adanya stigma terhadap ODGJ.
Belum Optimal Pengendalian dan Penanganan Penyebaran Covid-19.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insiden Rite kasus Terkonfirmasi Covid-19 Masih tinggi. 2. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan Pemantauan Epidemiologi (PE) Strategi 3T (Testing, Tracking, dan Treatment). 3. Kurangnya keterbukaan/kesadaran Masyarakat/keluarga dalam penanganan Covid-19. 4. Belum Optimal pelaksaaan kebijakan terkait penanganan Covid 19.
Belum optimalnya Pelaksanaan Surveilans, SKD-KLB, Penanganan Wabah/KBL dan Program Imunisasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih optimal Surveilans PD3I dan penyakit yang berpotensi KLB/Wabah. 2. Kurangnya sosialisasi Promosi Kesehatan terkait pemberian vaksin ke Masyarakat. 3. Belum Optimalnya pelaksanaan Manajemen Logistik (Vaksin, alat suntik, dan Cold Chain) Sesuai dengan Standar yang dilakukan oleh daerah.

3.2. TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BENGKALIS.

1. VISI

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi Kabupaten Bengkulu Tahun 2021-2026 mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kabupaten Bengkulu Tahun 2021-2026, yaitu “ **Terwujudnya Kabupaten Bengkulu yang Bermartabat, Maju dan Sejahtera**”.

Penjelasan Visi Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu adalah sebagai berikut:

1. **Bermartabat**, Bermakna: Suatu kondisi dimana masyarakatnya memiliki kebanggaan sebagai masyarakat yang bermartabat dengan terbentuknya karakter masyarakat berpengetahuan dan memiliki keunggulan kompetitif berdasarkan landasan keagamaan dan kebudayaan.
2. **Maju**, Bermakna: Suatu Kondisi Masyarakat yang Telah Terpenuhinya Semua Kebutuhan Baik Pangan, Sandang, Papan, Pendidikan, Kesehatan dan Pemanfaatan Teknologi, ditandai dengan Tingginya Pertumbuhan Ekonomi, Sumber Daya Manusia yang Kompetitif serta Masyarakat yang lebih Mandiri yang didukung oleh birokrasi pemerintah yang profesional dan berwibawa;
3. **Sejahtera**, Bermakna: Suatu Kondisi Masyarakat yang Telah Terpenuhinya Kebutuhan Dasar sebagai Wujud dari Pembangunan yang Adil dan Merata dan menyentuh semua Aspek Kehidupan yang ditandai dengan Tingkat Pendapatan yang Cukup, Rendahnya Angka Kemiskinan, Rendahnya

Tingkat Kriminal serta Tingkat Kesehatan dan Pendidikan yang sangat baik;

Misi merupakan seluruh upaya yang dilakukan untuk mencapai visi yang dinyatakan secara tegas dan jelas sebagai manifestasi dari keinginan masyarakat demi kemajuan daerah.

Atas dasar itu misi Tahun 2021 – 2026 dirumuskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian.

Tujuan :

Meningkatkan Kapasitas dan Kemampuan Keuangan Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia serta Meningkatkan Perekonomian Masyarakat.

Sasaran :

- Terwujudnya Perekonomian Masyarakat yang Maju.
- Terbangunnya basis ekonomi masyarakat yang kokoh.
- Terwujudnya pemulihan ekonomi daerah dan reformasi sosial pasca pandemi.
- Terkelolanya Potensi Sumber Daya Alam secara baik.
- Terwujudnya SDM yang unggul, mandiri dan berdaya saing.
- **Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.**
- Terwujudnya peningkatan kemandirian daerah.
- Terwujudnya pengelolaan potensi pesisir dan kemaritiman.

Strategi :

- Peningkatan Potensi Pendapatan Asli Daerah.

- Penataan dan penyesuaian semua Peraturan tentang penerimaan daerah.
- Reformulasi Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah.
- Penataan instrumen pembiayaan daerah melalui penyertaan modal, Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) dan optimalisasi peran BUMD melalui restrukturisasi sektor bisnis potensial seperti migas dan perkebunan.
- Peningkatan dan Penguatan Pembiayaan Pendidikan bagi anak-anak tempatan dan anak berprestasi.
- Penguatan kelembagaan balai latihan kerja dan lembaga pendidikan vokasi lainnya guna peningkatan kompetensi tenaga kerja seperti buruh dan pekerja informal lainnya.
- Peningkatan jumlah, kapasitas dan kualitas tenaga kesehatan.
- Peningkatan akses kesehatan bagi masyarakat.
- Optimalisasi Posyandu dan Pelayanan Kesehatan dalam Menangani Stunting serta Penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
- Peningkatan jumlah, kapasitas dan kualitas tenaga pendidikan.
- Peningkatan kesejahteraan guru PAUD secara adil dan merata.
- Pemetaan potensi desa, kecamatan dan kewilayahan secara terpadu.
- Penguatan peran BUMDes dalam Peningkatan Potensi Pendapatan Asli Desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa.
- Penguatan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan menjamin keberlangsungan usaha masyarakat.

- Membangun kekuatan ekonomi masyarakat menghadapi resesi akibat krisis atau pandemi melalui penerapan teknologi dan inovasi baik dari aspek produksi, pengelolaan, pemasaran, permodalan dan transaksi keuangan.
 - Penguatan struktur sosial masyarakat melalui program bantuan sosial, insentif dan pemberdayaan yang merata dan berkeadilan.
 - Optimalisasi Program Tanah Objek Reforma Agraria (Tora) untuk lahan pertanian dan perkebunan.
 - Pengembangan, penataan dan pengelolaan potensi wisata.
 - Penataan kelembagaan dan penguatan subsektor ekonomi kreatif berbasis teknologi informasi.
 - Pemberian Stimulus ekonomi dan penyediaan sarana prasarana pendukung bagi petani dan nelayan.
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter.

Tujuan :

Mewujudkan birokrasi yang bersih, melayani dan menggerakkan serta memperkuat karakteristik masyarakat yang handal dan berdaya saing, dengan bersandarkan pada nilai-nilai Budaya Melayu sehingga terciptanya pelayanan publik yang baik dan keharmonisan dalam masyarakat.

Sasaran :

- Terwujudnya pemerintah yang berkarakter dan berintegritas.
- Terwujudnya peningkatan kinerja pembangunan daerah.
- Terwujudnya pengelolaan aset daerah yang efektif, efisien dan produktif.

- Terciptanya iklim investasi yang kondusif.
- Terlaksananya agenda reformasi dan modernisasi birokrasi.
- Terwujudnya perubahan mindset aparatur dan budaya kerja yang positif.
- Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur.
- Terwujudnya pengembangan nilai-nilai budaya melayu dan keharmonisan hubungan antar masyarakat.
- Terwujudnya peningkatan peran perempuan dalam pembangunan melalui agenda perempuan berdaya keluarga sejahtera.
- Terwujudnya Pengembangan Olahraga dan Kepemudaan serta pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Strategi :

- Pengembangan inovasi daerah dan penggunaan Teknologi Informasi dalam meningkatkan pelayanan publik.
- Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien.
- Pengendalian dan evaluasi serta pengawasan berjenjang dalam pelaksanaan kegiatan.
- Penyederhanaan perizinan dan penguatan sistem pelayanan terpadu satu pintu berbasis online.
- Sinergitas pembangunan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan.
- Menciptakan ruang komunikasi publik yang baik dan terbuka.
- Peningkatan kualitas layanan kependudukan.
- Pengelolaan aset dan kekayaan daerah secara baik, efektif dan efisien.

- Peningkatan kompetensi aparatur melalui pendidikan yang jelas dan terukur.
 - Penguatan sinergi dengan lembaga pendidikan tinggi, lembaga adat, penggiat seni, budaya dan elemen lainnya.
 - Optimalisasi pendidikan keagamaan dalam semua level, dan peran guru-guru agama / ustad dalam membangun karakter generasi muda.
 - Peningkatan peran perempuan dalam berwirausaha dan berbagai kegiatan pembangunan daerah untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan masyarakat harmonis.
 - Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Pembinaan Olahraga dan Kepemudaan untuk memperkuat karakter pemuda yang berdaya saing dan terhindar dari penyalahgunaan narkoba.
 - Mengaktifkan dan mengoptimalkan peran dan fungsi Badan Narkotika Kabupaten (BNK).
 - Pemeliharaan dan Pelestarian Bangunan dan Benda Cagar Budaya (BCB).
 - Pengembangan kurikulum muatan lokal tentang budaya melayu di sekolah.
 - Pemekaran wilayah Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
3. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat.

Tujuan :

Meningkatnya Aksesibilitas Infrastruktur antar daerah dan antar wilayah, Mengoptimalkan Potensi Kabupaten Bengkalis Sebagai Daerah Perbatasan Demi Tercapainya Masyarakat Yang Sejahtera.

Sasaran :

- Tersedianya aksesibilitas infrastruktur antar kawasan, antar daerah dan antar wilayah.
- Tersedianya infrastruktur yang berkualitas.
- Tersedianya kawasan pemukiman dan perumahan yang tertata secara baik.
- Tersedianya sarana dan prasarana umum dan ruang terbuka hijau.
- Tersedianya layanan air bersih dan listrik yang memadai.
- Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Baik dan Berkesinambungan.
- Terwujudnya sinergi pembangunan antar kawasan, antar daerah dan antar pemerintah dengan memanfaatkan potensi kawasan perbatasan.

Strategi :

- Fungsionalisasi dan Optimalisasi RTRW dan RDTR Kabupaten Bengkalis.
- Penataan kawasan perkotaan, kawasan kumuh dan permukiman.
- Penyediaan database infrastruktur jalan, jembatan dan bangunan.
- Penyiapan, penataan dan pengembangan kawasan khusus seperti kawasan industri, kawasan ekonomi dan kawasan potensial lainnya.
- Penguatan infrastruktur pedesaan.
- Pembangunan dan penguatan infrastruktur antar kawasan, antar kecamatan dan antar desa.
- Pembangunan Kawasan Duri Central Park sebagai ruang terbuka hijau dan area publik.
- Penataan sarana dan prasarana umum, taman serta ruang terbuka hijau yang sejuk dan asri.

- Optimalisasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
- Pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) untuk Keluarga Miskin.
- Penanganan abrasi, sungai dan pantai secara berkelanjutan.
- Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana secara Konsisten dan Berkesinambungan.
- Pengelolaan persampahan secara terpadu dan berkelanjutan.
- Peningkatan penyelenggaraan pelayanan jasa transportasi roro.
- Optimalisasi pelayanan penyediaan air bersih.
- Koordinasi dan dukungan penyediaan kelistrikan bagi masyarakat.
- Peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) Perbatasan negara.
- Sinkronisasi dan Optimalisasi Pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas antar pulau dan antar daerah baik bersumber APBD Provinsi, APBN maupun sumber pembiayaan lainnya.
- Penguatan dan pemanfaatan kerjasama dalam dan luar negeri.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan, maka yang menjadi penekanan pada Misi ke-1 yakni **”Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian”** dengan tujuan Meningkatkan Kapasitas dan Kemampuan Keuangan Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia serta Meningkatkan Perekonomian Masyarakat

sedangkan sasarannya adalah **terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.**

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendorong dalam mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih antara lain :

1. Faktor Penghambat :

- 1) SOTK yang belum sesuai dengan kebutuhan dan regulasi. SOTK Dinas Kesehatan belum sesuai dengan Permendagri 50/20, karena masih adanya tumpang tindih antar bidang dan antar instansi
- 2) Belum terpadu dan terintegrasinya data kesehatan. Berbagai sistem aplikasi dan pelaporan yang ada di Dinas Kesehatan, FKTP, FKTL dan stake holder belum terintegrasi sehingga sering terjadi adanya data yang ganda
- 3) Belum meratanya sarana dan prasarana kesehatan. Belum meratanya sarpras kesehatan menyebabkan masyarakat belum semua mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang bermutu
- 4) Adanya disparitas kuantitas kualitas dan sebaran SDM Kesehatan
Hal ini menyebabkan pelayanan kesehatan yang bermutu dalam dapat menjangkau seluruh wilayah

2. Faktor Pendorong :

- 1) Adanya dukungan pembiayaan insentif bagi nakes. Pemberian insentif bagi nakes menimbulkan dampak motivasi yang tinggi bagi nakes ayanan kesehatan
- 2) Adanya SOP untuk mendukung organisasi. Adanya SOP membuat adanya standarisasi pelayanan dan mutu kesehatan
- 3) Adanya koordinasi dan kekompakan Tim.
- 4) Adanya Program JKN.

Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan wujud dan sekaligus metode penyelenggaraan pembangunan kesehatan memadukan berbagai upaya Bangsa Indonesia dalam guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh dukungan sistem nilai dan budaya masyarakat yang secara bersama terhimpun dalam berbagai sistem kemasyarakatan. JKN merupakan bagian dari sistem kemasyarakatan yang dipergunakan sebagai acuan utama dalam mengembangkan perilaku dan lingkungan sehat serta berperan aktif masyarakat dalam berbagai upaya kesehatan.

3.3. TELAAH RENSTRA KEMENTERIAN KESEHATAN DAN RENSTRA DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU.

Telaahan Kesesuaian terhadap Rencana Strategis antara Kementerian Kesehatan, Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Riau dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis antara lain :

3.3.1 Rencana Strategis Kementerian Kesehatan

Visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”. Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 9 Misi pembangunan yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

5. Memajukan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Sedangkan arah kebijakan RPJMN Kemenkes adalah “Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dan peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi” dengan strategi :

- Peningkatan kesehatan ibu, anak KB, dan kesehatan reproduksi
- Percepatan perbaikan gizi masyarakat
- Peningkatan pengendalian penyakit
- Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)
- Peningkatan pelayanan kesehatan dan pengawasan obat dan makanan

Untuk peningkatan kualitas dan pencapaian indikator sasaran telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan Kabupaten/Kota sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 dengan indikator ;

- Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal Sesuai Standar
- Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar

- Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
- Balita Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
- Pelayanan kesehatan usia Pendidikan Dasar Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar
- Pelayanan kesehatan pada usia produktif Usia 15 – 19 tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar
- Pelayanan kesehatan pada usia lanjut 60 tahun ke atas mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar
- Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar
- Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus sesuai standar
- Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Sesuai Standar
- Pelayanan kesehatan orang dengan TB sesuai Standar
- Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar.

3.3.2 Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Riau.

Visi Gubernur dan wakil Gubernur Riau menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Gubernur dan wakil Gubernur Riau ini menjadi visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 yaitu : **“Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)”**.

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan. Misi disusun

untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan untuk mencapai visi. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi dalam Rancangan Awal RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019 -2024 adalah :

Misi 1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya Saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya

Misi 2 Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing .

Misi 3 Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan pelayanan public yang prima berbasis teknologi informasi

Misi 4 Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

Misi 5 Mewujudkan budaya melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan Pariwisata berdaya saing.

Misi Gubernur dan wakil Gubernur Riau yang terkait langsung dengan Dinas kesehatan adalah misi pertama yaitu mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya. Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Dinas Kesehatan melaksanakan kebijakan di bidang kesehatan yaitu :

1. Meningkatkan Pembiayaan Kesehatan;
2. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan;
3. Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
4. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan;
5. Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Melalui GERMASl;
6. Meningkatkan Pelayanan Kefarmasian dan Alkes;
7. Meningkatkan Pengembangan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

3.4. TELAAH RT/RW DAN KLHS.

Meskipun indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) kabupaten Bengkalis yang secara perlahan memperlihatkan peningkatan dari tahun 2017 hingga tahun 2019, namun permasalahan lingkungan hidup di kabupaten Bengkalis terutama yang terkait dengan wilayah-

wilayah yang rawan bencana perlu mendapatkan perhatian yang serius.

Kebakaran lahan dan hutan terjadi di musim kemarau hampir setiap tahun. Tahun 2019 kebakaran lahan dan hutan masih menempatkan kabupaten Bengkalis sebagai wilayah dengan titik api terbanyak keempat di Provinsi Riau. Permasalahan kebakaran lahan dan hutan ini sering diakibatkan oleh pembukaan lahan dengan pembakaran. Selain masalah kesehatan masyarakat yang terdampak langsung seperti ISPA, kebakaran tersebut juga telah mengakibatkan rusaknya ekosistem lahan dan hutan terutama daerah gambut, berkurangnya daerah cadangan air baku serta terganggunya perekonomian masyarakat setempat.

Di samping itu, masalah abrasi dan erosi wilayah pesisir di bagian utara pulau rupa, bagian timur pulau Bengkalis dan bagian timur wilayah kecamatan Bukit Batu, kabupaten Bengkalis juga sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan. Kondisi tanah pesisir yang aluvial dan gambut yang rentan terhadap kikisan arus dan energi gelombang laut selat Melaka telah mengakibatkan tingkat abrasi yang tinggi. Selain itu, perubahan iklim laut yang terjadi semakin meningkatkan potensi banjir rob di sebagian wilayah pemukiman serta jalan raya akibat naiknya muka air laut dan potensi bencana badai angin serta hempasan gelombang tinggi.

Pada bagian utara pulau Bengkalis, dimana kondisi lahan pesisir yang telah beralih fungsi menjadi perkebunan, mengalami erosi atau pergerakan tanah ke arah laut yang signifikan.

Abrasi, erosi serta banjir rob ini memerlukan strategi tata kelola pesisir yang tepat agar menjamin kelestarian lingkungan hidup dan membantu peningkatan nilai ekonomi wilayah bagi masyarakat.

Upaya-upaya dalam rangka pencegahan kerusakan lingkungan hidup masih terkendala dengan beberapa faktor antara lain; masih belum optimalnya pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup terhadap aktivitas pemanfaatan lahan, industri dan pembangunan sebagai akibat belum terpenuhinya aparatur pengawas lingkungan hidup, peran serta lembaga adat dan tokoh-tokoh agama yang belum terkoordinasi dengan optimal untuk berpaduserasi dengan Pemerintah Daerah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup dan cadangan sumberdaya alam terbarukan di Kabupaten Bengkalis dan masih lemahnya pelaksanaan kearifan lokal masyarakat dalam

memelihara lingkungan hidup serta cadangan sumberdaya alam terbarukan

3.5. PENENTUAN ISU STRATEGIS.

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber. Adapun isu strategis yang patut diangkat dalam Rencana Strategis ini ditetapkan berdasarkan kriteria-kriteria yaitu memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah dan nasional, merupakan tugas dan tanggungjawab SOPD Dinas Kesehatan, mempunyai dampak yang luas terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan kesehatan, dan kemudahannya untuk dikelola.

Sedangkan isu-isu strategis Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis antara lain ;

1. Belum Baiknya Mutu Pelayanan Kesehatan
2. Belum Semuanya Masyarakat Memiliki Jaminan Kesehatan
3. Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI).
4. Tingginya Angka Kematian Bayi (AKB).
5. Masih Rendahnya derajat kesehatan masyarakat
6. Masih Adanya Gizi Kurang, Buruk dan Balita Stauting.
7. Belum baiknya manajemen SDM Kesehatan.
8. Belum meratanya akses pelayanan kesehatan sesuai standar
9. Belum baiknya sistem manajemen obat dan PHP yang baik dan benar.
10. Belum Optimalnya Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular.
11. Belum Optimal Pengendalian dan Penanganan Penyebaran Covid-19.
12. Belum optimalnya Pelaksanaan Surveilans, SKD-KLB, Penanganan Wabah/KBL dan Program Imunisasi.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KESEHATAN

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis tahun 2021-2026. Hal ini mengingat bilamana visi dan misi Bupati dan wakil Bupati tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif kedalam tujuan dan sasaran, maka program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Dalam hal ini, tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam rencana strategis Dinas Kesehatan yang merupakan bagian dari RPJMD Kabupaten Bengkalis 2021-2026 dengan tujuan dan sasaran strategis tertuang dalam Misi 1 RPJMD akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis. Renstra Dinas Kesehatan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki keterkaitan sangat erat dalam pembangunan kesehatan masyarakat yang bertujuan meningkatkan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Hubungan antara tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 dengan Rancangan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 serta target-target yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KESEHATAN

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat Yang Tinggi	1. Peningkatan Kualitas/Mutu Pelayanan Kesehatan.	1. Pelayanan Puskesmas BLUD	0	18	18	20	20	21	22
			2. Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan	79	90	95	100	100	100	100
			3. Penyelenggaraan operasional puskesmas	18	18	18	20	20	21	22
			4. Puskesmas Terakreditasi	17	17	18	20	20	21	22
			5. Rumah Sakit yang memenuhi persyaratan akreditasi	6	6	6	6	6	6	6
		2. Peningkatan Penanganan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	1. Persentase warga negara usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	37,4%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			2. Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	79,9%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			3. Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			4. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	72,4%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			5. Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			6. Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	40%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			7. Persentase Pelayanan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
			8. Persentase Pelaksanaan kegiatan Surveilans Penyakit sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			9. Persentase penduduk yang dilayani kesehatan dalam upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			10. Persentase Penyakit Menular dan Tidak Menular yang dilayani sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			11. Jumlah penelitian kesehatan	-	5	5	5	5	5	5
		3. Pemerataan akses pelayanan kesehatan sesuai standar	1. Jumlah Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	-	-	-	1	-	-	1
			2. Jumlah Pembangunan Puskesmas	2	-	-	1	-	1	-
			3. Jumlah Pengembangan Puskesmas	-	-	-	-	1	-	1
			4. Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	20	20	20	20	20	20	20
			5. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasyankes	1	1	1	1	1	1	1
			6. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	50	50	50	50	50	50	50
			7. Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	18	20	20	21	22
			8. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	-	25	30	40	50

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
		4. Optimalisasi sistem manajemen obat dan BHP, pengawasan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, Optik dan UMOT	1. Pengadaan Obat, Vaksin	208	208	208	210	215	220	225
			2. Pengadaan Bahan Habis Pakai	-	-	-	20	20	21	22
			3. Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dilakukan pengendalian dan pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan	-	-	-	60	70	80	90
			4. Persentase Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	-	-	100%	100%	100%	100%
		5. Optimalisasi manajemen SDM Kesehatan	1. Persentase pemberian perizinan praktik tenaga kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			2. Jumlah dokumen perencanaan dan distribusi sumber daya manusia kesehatan	1	1	1	1	1	1	1
			3. Persentase sumber daya manusia kesehatan dilakukan pembinaan dan pengawasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			4. Persentase tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi	40%	40	45	46	47	48	50
		6. Peningkatan Pemerataan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1. Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	85,4%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			2. Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	78,5%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			3. Persentase bayi baru usia 0-28 hari lahir mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	86,5%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			4. Persentase balita usia 12-23 bulan mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	64,8%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
			5. Persentase anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	92,6%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			6. Persentase warga negara usia 15–59 tahun mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	37,4%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			7. Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	92,2%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			8. Persentase Balita Gizi Buruk	1,90%	2.5%	2.3%	2%	1.8%	1.5%	1.4%
			9. Persentase Balita Stunting	10,60%	20%	17%	15%	14%	12,0%	10%
			10. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (PHBS)	18	18	18	20	20	21	22
			11. Penduduk menggunakan jamban sehat	70%	70	73	76	79	82	85
			12. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga yang dilakukan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	-	50%	55%	60%	65%	70%	75%
			13. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang dilakukan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	-	44%	50%	56%	62%	68%	74%
			14. Desa Siaga Aktif	124	150	130	130	130	130	130

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
		7. Peningkatan kualitas capaian kinerja pegawai dan manajemen keuangan	1. Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3	3	3	3	3	3
			2. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan pengelolaan milik daerah)	7	7	7	7	7	7	7
			3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	150	150	155	160	165	170	175

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan dalam pembangunan kesehatan Kabupaten Bengkalis 2021-2026 untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat dalam pelaksanaan program dan kegiatan menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata menyusun strategi untuk dilaksanakan sesuai Misi Rencana Strategis telah dijabarkan pada Tabel 5.1

5.2. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan Dinas Kesehatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kesehatan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku hidup bersih dan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan, secara adil dan merata dengan arah kebijakan program dan kegiatan Dinas Kesehatan dapat dilihat pada Tabel 5.1

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Yang Bermarwah, Maju Dan Sejahtera			
Misi 1 : Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Trwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat Yang Tinggi	1. Meningkatnya akses / mutu pelayanan kesehatan masyarakat	1. Peningkatan pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan serta sumberdaya kesehatan	1. Pelayanan Puskesmas BLUD 2. Puskesmas Terakreditasi. 3. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas. 4. Jaminan Kesehatan kepada Seluruh Masyarakat yang kurang mampu. 5. Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur,
	2. Meningkatnya Penanganan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	1. Peningkatan Penanganan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Sesuai Standar. 2. Penanggulangan KLB/Wabah Penyakit sesuai standar 3. Peningkatan Surveilans Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	3. Pemerataan akses pelayanan kesehatan sesuai standar	1. Peningkatan Pemerataan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya. 2. Pembangunan Puskesmas/Puskesmas Pembantu/Poskesdes/Polindes. 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Kesehatan.
	4. Optimalisasi sistem manajemen obat dan BHP, pengawasan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, Optik dan UMOT serta PP-IRTP.	1. Peningkatan sistem manajemen obat dan BHP, pengawasan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, Optik dan UMOT serta PP-IRTP.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 2. Pengadaan Obat, Vaksin, BHP. 3. Pengawasan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, Optik dan UMOT serta PP-IRTP.
	5. Optimalisasi manajemen SDM Kesehatan	1. Peningkatan manajemen Sumber Daya Manusia Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi Tenaga Kesehatan 2. Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan 3. Pemberian, pembinaan dan pengawasan Praktek Tenaga Kesehatan.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	6. Pemerataan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1. Peningkatan Pemerataan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Ibu Hamil, Ibu Melahirkan, Bayi Baru Lahir, Balita, Usia Lanjut sesuai standar. 2. Penanganan Balita Gizi Buruk, Balita Gizi Kurang dan Balita Stanting sesuai standar. 3. Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. 4. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup puskesmas. 5. Peningkatan akses Sanitasi Dasar Puskesmas.
	7. Meningkatnya kualitas capaian kinerja pegawai dan manajemen keuangan	2. Peningkatan kualitas kinerja pegawai dan manajemen keuangan yang akuntabel.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Manajemen Administasi Umum dan Kepegawaian. 2. Penigkatan Manajemen Keuangan yang akuntabel.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

4.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis tahun 2021-2026, program dan kegiatan dikategorikan kedalam program dan kegiatan prioritas RPJMD, program dan kegiatan prioritas perangkat daerah, kegiatan lintas perangkat daerah dan kegiatan lintas program perangkat daerah. Program prioritas RPJMD dan program prioritas perangkat daerah saling bersinergis untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran RPJMD, demikian pula dengan indikator kinerja sasaran RPJMD dan indikator kinerja sasaran OPD. Rencana Strategis periode tahun 2021-2026 yang disesuaikan dengan tujuan Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk menjadikan Kabupaten Bengkalis bengkalis yang bermarwah, maju dan sejahtera maka akan dituangkan pula Indikator Kinerja Utama di urusan kesehatan yang dapat menjadi daya ungkit capaian Indikator Kinerja Utama di Tingkat Kabupaten.

Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis tahun 2021-2026 merupakan rencana kerja tahunan, yang saling selaras dengan program dan kegiatan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Propinsi Riau demikian juga halnya dengan indikator kinerja sasaran program kegiatan termasuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan. Adapun rencana program, kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1.

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis

Tujuan	sasaran	KODE						Program, kegiatan, sub kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target								
		2021			2022					2023		2021		2022		2023		
		Target		Rp.	Target		Rp.			Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.
		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat Yang Tinggi	1. Meningkatnya akses/ mutu pelayanan kesehatan masyarakat	XX	XX	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penyelenggaraannya penunjang urusan dinas kesehatan	100	-	100	111972	100				
		XX	XX	1	2	10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Puskesmas BLUD	100	-	100	111,972	100				
		XX	XX	1	2	10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas BLUD	-	-	18	111,972	20				
		1	2	2	1.	2.	3.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	90	25,092	95	96,835	100				
		1	2	2	2	1		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penyediaan layanan kesehatan	100	24,315	100	95,826	100				

									Cakupan puskesmas Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupu+K12:U16ntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	100	-	100	-	100
									Persentase masyarakat yang mendapatkan jaminan kesehatan	90		95		100
									Cakupan Puskesmas mendapat pembiayaan operasional	100	-	100	-	100
									Cakupan Puskesmas Terakreditasi	100	-	100	-	100
									Cakupan RS yang melayani SPGDT	100	-	100	-	100
	1	2	2	2	2	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Puskesmas yang melakukan pengelolaan yankes Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	-	0	18	178	20	
	1	2	2	2	2	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Cakupan masyarakat yang mendapatkan jaminan kesehatan	90	17,857	90	89,190	100	
								Jumlah peserta BPJS Non Kapitasi yang dilayani	-	800	444,830	850	N/A	

								Jumlah peserta jamkesmasda integrasi ke JKN	-	2,143	1,359,840	69,555	N/A
								Jumlah peserta JKN mendapatkan pelayanan di FKTP	-	14,664	5,361,960	18,525	N/A
								Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan jaminan	18	250	19	260	19
1	2	2	2	2	2	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah RS yang operasional	-	0	-	0	-
1	2	2	2	2	2	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Operasional Puskesmas	18	6,458	18	6,458	20
1	2	2	2	2	2	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Operasional fasilitas kesehatan lainnya	-	0	-	0	-
1	2	2	2	2	2	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas Terakreditasi	17	0	18	0	20
1	2	2	2	2	2	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah RS Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	6	0	6	0	6
1	2	2	2	3			Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	Cakupan puskesmas yang menggunakan sistem informasi kesehatan	100	268	100	237	100

		1	2	2	2	3	1	Pengelolaan data dan informasi kesehatan	Jumlah Dokumen data dan informasi kesehatan	1	0	1	0	1
		1	2	2	2	3	2	Pengelolaan sistem informasi kesehatan	Jumlah Puskesmas melaksanakan pengelolaan sistem informasi kesehatan	18	268	18	237	20
		1	2	2	2	3	1	Pengadaan alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet	Jumlah Pengadaan alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet	-	0	-	0	-
		1	2	2	2	4		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	509	100	772	100
		1	2	2	2	4	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasyankes Lainnya	Jumlah RS melakukan pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasyankes Lainnya	6	0	6	443	6
		1	2	2	2	4	2	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasyankes Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RS peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasyankes	6	0	6	0	6

		1	2	2	2	4	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Cakupan peningkatan mutu pelayanan Pusk dan RS	100	106	100	189	100
								Rumah Sakit yg memenuhi persyaratan akreditasi	Jumlah RS yg memenuhi persyaratan akreditasi	6	0	6	0	6
								Penyediaan pelayanan dialisis sesuai standar	Jumlah RS meenyediaan pelayanan dialisis sesuai standar	2	0	2	0	2
								Mamanajemen puskesmas sesuai standar	Jumlah puskesmas yang melaksanakan manajemen puskesmas sesuai standar	18	0	18	57	20
								Penyelenggaraan Puskesmas DTPK	Jumlah Puskesmas menyelenggaraan Puskesmas DTPK	18	106	2	132	2
		1	2	2	2	4	4	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Cakupan yang melaksanakan fasilitas rujukan	25	403	25	140	25
								Jumlah pelayanan kesehatan rujukan distrata 1	orang mendapatkan pelayanan kesehatan rujukan distrata 1	140	403	2,151	140	N/A
								Rumah Sakit memberikan pelayanan sesuai standar	Jumlah RS memberikan pelayanan sesuai standar	6	0	6	0	6

Trwujud nya Derajat Keseha tan Masyara kat Yang Tinggi	2. Peningkatan Penanganan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	1	2	2	4.	5.	6.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100	6264	100	7598	100
		1	2	2	2	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan layanan kesehatan	100	6264	100	7598	100
									Persentase warga negara usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	-	100	-	100
									Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100	-	100	-	100
									Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	-	100	-	100
									Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	-	100	-	100
									Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100	-	100	-	100

									Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100	-	100	-	100
									Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	100	-	100	-	100
									Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	100	-	100	-	100
									Persentase Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100	-	100	-	100
									Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	100	-	100	-	100
									Persentase Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	100	-	100	-	100

									Persentase Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	100	-	100	-	100
									Persentase Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	100	-	100	-	100
									Persentase Peningkatan Penelitian Kesehatan	2	-	4	-	6
									Persentase Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (KIPI dan Pemberian Obat Massal)	100	-	100	-	100
									Persentase Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	100	-	100	-	100
		1	2	2	2	2	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	27,530	414	30,282	414	33,311

		1	2	2	2	2	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	117,201	98	128,921	300	141,813
		1	2	2	2	2	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita DM	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	14,948	94	16,443	220	18,087
		1	2	2	2	2	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan ODGJ	Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	-	0	-	0	18
		1	2	2	2	2	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	376	165	414	567	455
		1	2	2	2	2	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	9,930	360	10,923	545	12,025
		1	2	2	2	2	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah pelayanan kesehatan masyarakat pada saat KLB	N/A	0	-	0	-
		1	2	2	2	2	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah pelayanan kesehatan masyarakat pada saat Bencana Alam	N/A	0	-	0	-

		1	2	2	2	2	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan pengelolaan Surveilans Kesehatan	100	377	100	689	100
									Jumlah jamaah calon haji diperiksa kesehatan selama 3 bulan	470	300	470	611	470
									Kasus AFP ditemukan	3	25	3	27	3
									Jumlah spesimenSuspek Campak	1	52	1	51	1
		1	2	2	2	2	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Puskesmas melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	18	643	18	650	18
		1	2	2	2	2	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Puskesmas Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	NA	0	-	0	-
		1	2	2	2	2	24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah pelayanan kesehatan masyarakat pasca krisis	N/A	0	-	0	-
		1	2	2	2	2	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100	4,113	100	4,113	100
								Bumil skrining hepatitis	jumlah Bumil skrining hepatitis	12,558	247	12,558	247	12,558
								kasus gigitan HPR positif mendapat Vaksin	jumlah kasus gigitan HPR positif mendapat Vaksin	5	146	5	146	5

									pemeriksaan IVA dan Payudara perempuan	jumlah orang dilakukan pemeriksaan IVA dan Payudara perempuan	15,778	414	15,778	414	-
									pemeriksaan mikrofilaria pada anak sekolah SD	Jumlah pemeriksaan mikrofilaria pada anak sekolah SD	3000	147	3000	147	3000
									penderita baru kusta tanpa cacat	jumlah penderita baru kusta tanpa cacat	3	135	3	135	3
									penderita diare pada balita yang diobati sesuai standar	Jumlah penderita diare pada balita yang diobati sesuai standar	5,443	410	5,443	410	5,600
									penderita malaria positif ditemukan mendapat pengobatan ACT	Jumlah penderita malaria positif ditemukan mendapat pengobatan ACT	5	160	5	160	5
									penderita pneumoni pada balita yang diobati	Jumlah penderita pneumoni pada balita yang diobati	630	137	630	137	630
									penemuan dan penanganan penderita DBD	Jumlah penemuan dan penanganan penderita DBD	876	2,317	876	2,317	876
		1	2	2	2	2	27		Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah puskeams melakukan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	18	0	18	0	20
		1	2	2	2	2	28		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	N/A	0	-	0	-

		1	2	2	2	2	31	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah Pengelolaan Penelitian Kesehatan	5	0	5	100	5
		1	2	2	2	2	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (KIPI dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah kasus dilakukan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (KIPI dan Pemberian Obat Massal)	N/A	0	-	0	-
		1	2	2	2	2	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah kasus dilakukan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	N/A	0	-	0	-
Terwujud nya Derajat Kesehatan Masyarakat Yang Tinggi	3. Pemerataan akses pelayanan kesehatan sesuai standar	1	2	2				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	80	74,674	85	70,696	90
		1	2	2	2	1		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan	80	72,179	85	65,937	90
									Rasio puskesmas 5,5 per 100.000 pddk	3	-	3	-	3
									Rasio pustu 12,5 per 100.000 penduduk	74	-	70	-	60
									Rasio Rumah Sakit 2 per 100.000 pddk	1	-	1	-	1
									Cakupan Puskesmas memiliki Sarana/Peralatan sesuai standar	70	-	75	-	80

								Cakupan Puskesmas yang memiliki peralatan kesehatan sesuai standar	70	-	75	-	80
1	2	2	2	1	1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	-	0	-	0	1	
1	2	2	2	1	2	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pembangunan Puskesmas	-	0	-	0	1	
1	2	2	2	1	3	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	0	-	0	1	
1	2	2	2	1	4	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	-	0	-	0	1	
1	2	2	2	1	5	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Pengembangan Rumah Sakit	-	0	-	0	-	
1	2	2	2	1	6	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Pengembangan Puskesmas	-	0	-	0	-	
1	2	2	2	1	7	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	0	-	0	-	
1	2	2	2	1	8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	-	0	-	0	-	
1	2	2	2	1	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	18	0	18	0	20	
1	2	2	2	1	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	0	-	0	-	
1	2	2	2	1	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	-	0	-	0	20	

		1	2	2	2	1	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	20	27,807	20	27,807	20
		1	2	2	2	1	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1	2,796	1	2,800	1
		1	2	2	2	1	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Set Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	50	41,576	50	35,330	50
		1	2	2	2	1	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	-	0	-	0	5
		1	2	2	2	1	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	0	-	0	20
		1	2	2	2	1	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	0	-	0	1
		1	2	2	2	1	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah unit Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	0	-	0	25
Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat Yang Tinggi	4. Optimalisasi sistem manajemen obat dan BHP, pengawasan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, Optikal dan UMOT	1	2	2				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat					

		1	2	2	2	1		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan	80	2,495	85	4,759	90
									Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	100	-	100	-	100
									Persentase ketersediaan BHP di Puskesmas	100	-	100	-	100
		1	2	2	2	1	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah item Pengadaan Obat, Vaksin	50	1,169	208	3,433	210
		1	2	2	2	1	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah item Pengadaan Bahan Habis Pakai	48	1,326	50	1,326	75
		1	2	2	2	1		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Telemedicine di Fasyankes	100	0	100	0	100
		1	2	2	2	2	30	Penyediaan Telemedicine di Fasyankes	Jumlah Puskesmas Penyediaan Telemedicine di Fasyankes	-	0	-	0	20
		1	2	4		14.	15.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase penyediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	80	246	85	420	90

		1	2	4	2	1		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	persentase Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	80	246	85	420	90
									Cakupan melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).	-	-	18	-	20
									Cakupan Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	-	100	-	100

									Cakupan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	-	100	-	100
		1	2	4	2	1	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).	Jumlah puskesmas melakukan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).	18	197	18	345	20
		1	2	4	2	1	2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah sarana Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	105	49	105	75	105
		1	2	4	2	1	3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Sarana	-	0	-	0	-

		1	2	4	2	2		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Cakupan Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga bersertifikat	-	0	-	0	-
		1	2	4	2	2	1	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Unit Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	-	0	-	0	-
		1	2	4	2	2	2	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Unit Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	-	0	-	0	-
Terwujud nya Derajat Kesehatan Masyarakat Yang Tinggi	5. Optimalisasi manajemen SDM Kesehatan	1	2	3			16.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	100	12,666	100	336	100
		1	2	3	2	1		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan	100	59	100	144	100

									Cakupan Praktik Tenaga Kesehatan di beri izin	100	-	100	-	100
	1	2	3	2	1	1		Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Nakes dilakukan pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	-	0	-	0	50
	1	2	3	2	1	2		Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik nakes.	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik nakes.	40%	59	45%	144	46%
									Jumlah rekomendasi yang ditetapkan untuk sarana kesehatan	32	0	32	65	32
									Jumlah rekomendasi perizinan yang ditetapkan untuk tenaga kesehatan	585	59	585	79	590
	1	2	3	2	2			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			12,503			
									Cakupan Dokumen Perencanaan dan Distribusi Sumber Daya Manusia Kesehatan	100	-	100	-	100
									Cakupan Dokumen Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	100	-	100	-	100

								Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100%	-	100%	-	100%
	1	2	3	2	2	1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	57	1	176	1
	1	2	3	2	2	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	152	12,204	152	13,424	152
	1	2	3	2	2	3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah nakes dilakukan pembinaan dan pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	666	242	666	428	666
	1	2	3	2	3		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	40%	104	45%	192	46%
	1	2	3	2	3	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	NAKES	585	104	585	192	585

Terwujud nya Derajat Kesehatan Masyarakat Yang Tinggi	6. Peningkatan Pemerataan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1	2	2				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100	3,339	100	3,159	100
		1	2	2	2	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100	3,339	100	3,159	100
									Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000	2	-	0	-	0
									Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KLH	210	-	205	-	200
									Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	100%	-	100%	-	100%
									Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar	100%	-	100%	-	100%
									Persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja dan olah raga	100%	-	100%	-	100%
									Cakupan Puskesmas melaksanakan Pelayanan Promosi Kesehatan	100%	-	100%	-	100%
									Cakupan Kecamatan menyelenggarakan Kabupaten Sehat	40	-	50	-	60

		1	2	2	2	2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	100%	264	100%	204	100%
									Jumlah bumil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar 4 kali	12,230	264	12,597	102	12,975
									Jumlah komplikasi kebidanan yang ditangani	2265	0	2265	102	2265
		1	2	2	2	2	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	10,615	127	10,934	243	11,262
		1	2	2	2	2	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	11,044	27	11,265	36	11,470
		1	2	2	2	2	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	100%	504	100%	504	100%
									Jumlah balita mendapatkan pelayanan kesehatan minimal 8 kali	48,775	504	48,775	504	48,775
									Jumlah Bayi usia 0-11 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap	11,492	0	11,492	0	11,492
									Jumlah bayi usia kurang 6 bulan mendapat ASI Eksklusif	6,015	0	6,015	0	6,015
									Jumlah Posyandu aktif	480	0	480	0	480

		1	2	2	2	2	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar sesuai standar	100%	96	100%	155	100%
									Jumlah anak didik kelas 1,2,3 SD/MI diimunisasi	43,170	96	43,170	155	43,170
									Pemeriksaan kesehatan anak didik kelas 1,7 dan 10 oleh nakes	24,387	0	24,875	0	25,372
		1	2	2	2	2	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut sesuai standar	Cakupan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut sesuai standar	100%	75	100%	96	100%
									Jumlah lansia mendapatkan pelayanan kesehatan lansia sesuai standar	21,563	75	23,288	96	25,151
									Jumlah posyandu lansia aktif	156	0	156	0	156
		1	2	2	2	2	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100	1,490	100	1,490	100
									Cakupan Bumil mendapatkan Bumil KEK	100%	-	100%	-	100%
									Cakupan Gizi Buruk	2.5%	-	2.3%	-	2%
									Cakupan Gizi Kurang	8.5%	-	8%	-	7.5%
									Cakupan Balita Stunting	20%	-	17%	-	15%
								Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	2	54	2	54	2
								Gizi Kurang	Jumlah Balita Gizi Kurang	327	290	327	290	327

							Balita Stunting	Jumlah Balita Stunting	300	396	300	396	275
							Bumil KEK	Jumlah Bumil KEK	325	750	325	750	325
	1	2	2	2	2	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan olah raga	Cakupan Puskesmas yang melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan olah raga	100	106	100	110	100
	1	2	2	2	2	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100	163	100	250	100
								Cakupan desa bersertifikat SBS	60	-	65	-	70
								Persentase Penduduk menggunakan jamban sehat	70	-	73	-	76
								Cakupan Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup	10%	-	20	-	30
							Desa/Kel bersertifikat Stop BABS	Jumlah Desa/Kel bersertifikat Stop BABS	83	163	93	200	107
							Penduduk menggunakan jamban sehat	Jumlah Penduduk menggunakan jamban sehat	-	0	518	0	600
							Puskesmas melakukan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah Puskesmas melakukan pengelolaan lingkungan hidup	-	0	-	0	1
	1	2	2	2	2	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Puskesmas Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	18	0	18	50	20

		1	2	2	2	2	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Kecamatan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	5	641	6	300	7
		1	2	4		17	18	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase penyediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	-	0	50	226	60
		1	2	4	2	3		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Cakupan Pemberian Sertifikat P-IRT dan Nomor P-IRT	-	0	55%	107	60%

		1	2	4	2	3	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah P-IRT dilakukann pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-	0	358	107	358
		1	2	4	2	4		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Cakupan Pemberian Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	-	0	50	119	56

		1	2	4	2	4	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah TPM dilakukan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-	0	59	119	65
		1	2	4	2	5		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Cakupan Pemberian Stiker	-	-	-	-	56
		1	2	4	2	5	1	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Produk Makanan Jajanan yang dilakukan pembinaan dan Pengawasan	-	-	-	-	25
		1	2	4	2	6		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga					10

								Cakupan Pemeriksaan post Market	-	-	-	-	10
								Cakupan pengawasan Perizinan P-IRT	-	-	-	-	10
	1	2	4	2	6	1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Post Market yang dilakukan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	-	-	-	-	10
	1	2	4	2	6	2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah P-IRT yang dilakukan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	-	-	-	-	10
	1	2	5	19	20	21	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100	515	100	875	100
	1	2	5	2	1		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	100	280	100	414	100

		1	2	5	2	1	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	100	280	100	414	100
									Cakupan desa siaga aktif	80	-	87	-	89
									Cakupan puskesmas yang melaksanakan perkesmas	100	-	100	-	100
									Cakupan masyarakat mendapat prokes (minil 2%)	2	-	2.5	-	3
								Desa Siaga Aktif	Jumlah Desa Siaga Aktif	124	280	124	150	130
								Puskesmas yang melaksanakan Perkesmas	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Perkesmas	18	0	18	36	20
								Penyebaran media informasi dan promosi kesehatan	Jumlah kali Penyebaran media informasi dan promosi kesehatan	70	0	70	228	85
		1	2	5	2	2		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif	10	235	10	461	10
		1	2	5	2	2	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Cakupan rumah ber-PHBS	10	235	15	461	20
									Jumlah desa yang melaksanakan PHBS	-	235	123	337	123
									Jumlah rumah tangga ber-PHBS	-	0	13,563	124	13,689

		1	2	5	2	3		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	0	-	0	32
		1	2	5	2	3	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kali	-	0	-	0	32
Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat Yang Tinggi	7. Peningkatan kualitas capaian kinerja pegawai dan manajemen keuangan	1	2					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan kinerja penunjang urusan dinas kesehatan	100	92,073	100	99,496	100
		1	2	1	2	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	90	312	95	715	95
									Cakupan Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penganggaran program	90	-	95	-	95
									Cakupan peningkatan laporan capaian kinerja SKPD	90	-	95	-	95
		1	2	1	2	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	3	144	3	330	3

		1	2	1	2	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	168	5	385	5
		1	2	1	2	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan	100	84,821	100	90,000	100
		1	2	1	2	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1	84,821	1	90,000	1
		1	2	1	2	3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kualitas Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	1,269	100	1,269	100
									Cakupan peningkatan tertib barang milik daerah	100	-	100	-	100
									Cakupan peningkatan pengawasan dan pengendalian barang milik daerah	100	-	100	-	100
		1	2	1	2	3	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (tenaga keamanan kantor)	Jumlah tenaga keamanan kantor	61	1,171	63	1,171	65
		1	2	1	2	3	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	7	98	7	98	7

		1	2	1	2	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90	521	91	521	92
									Cakupan ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	90	-	91	-	92
									Cakupan ASN yang mendapatkan bimbingan teknis	90	-	91	-	92
		1	2	1	2	5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	150	351	150	351	360
		1	2	1	2	5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah ASN yang mendapatkan Bimbingan Teknis Implementasi	50	170	50	170	180
		1	2	1	2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	1,179	100	1,754	100
									Cakupan Peningkatan penyediaan listrik kantor	100	-	100	-	100
									Cakupan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	-	100	-	100
									Cakupan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100	-	100	-	100
									Cakupan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	-	100	-	100

									Cakupan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100	-	100	-	100
									Cakupan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	100	-	100	-	100
									Cakupan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	-	100	-	100
1	2	1	2	6	1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (unit)	6	30	6	80.1	6	
1	2	1	2	6	2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Item)	21	460	21	736.9	21	
1	2	1	2	6	4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan makan dan mibum kantor (Porsi)	732	34	732	70.2	732	
1	2	1	2	6	5		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Item)	5	85	5	166.7	5	
1	2	1	2	6	6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah surat kabar/ majalah	6	40	6	40	6	
1	2	1	2	6	9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas Bimtek dan Koordinasi (Kali)	550	530	550	660	550	
1	2	1	2	8			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	2,192	100	2,915	100	

									Cakupan penyediaan tenaga keamanan kantor	100	-	100	-	100
									Cakupan penyediaan adm surat menyurat kantor	100	-	100	-	100
									Cakupan Kebutuhan listrik dan jaringan komunikasi kantor	100	-	100	-	100
									Cakupan penyebaran informasi kes.	100	-	100	-	100
									Cakupan Ketersediaan tenaga pengemudi	100	-	100	-	100
									Cakupan PKB/TNKB kendaraan dinas jabatan/ operasional	100	-	100	-	100
	1	2	1	2	8	1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan penyediaan jasa surat menyurat	100	903	100	903	100
								Tenaga Adminstrasi kantor	Orang	68	890	68	890	68
								Adm. surat menyurat	Surat	3,110	13	3,110	13	3,110
	1	2	1	2	8	2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	579	100	978	100
	a.	b.	c.	d.	e.			Kebutuhan listrik, air dan jaringan komunikasi kantor	Unit	2	446	2	742	2

		f.	g.	h.	i.	j.		penyebaran informasi kes.	kali	1	133	1	236	1
		1	2	1	2	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	710	100	1034	100
		k.	l.	m.	n.	o.		Ketersediaan tenaga pengemudi	orang	46	633	46	957	46
		p.	q.	r.	s.	t.		PKB/TNKB kendaraan dinas jabatan/ operasional	Unit	45	77	45	77	45
		1	2	1	2	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	1,779	100	2,322	100
		1	2	1	2	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan peningkatan penyediaan jasa, pemeliharaan dan pajak kendaraan kantor	100	478	100	500	100
		1	2	1	2	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan emeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	1056	100	1322	100
								Tenaga Kebersihan	orang	55	1056	55	1322	55

			1	2	1	2	9	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	127 unit	245	127 unit	500	127 unit
--	--	--	---	---	---	---	---	----	--	---	----------	-----	----------	-----	----------

Tujuan	sasaran	KODE						Program, kegiatan, sub kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Cakupan Awal Program										Pj / Lokasi								
										Target		Target		Target		Target		Target			Kinerja Akhir Renstra							
										2021		2022		2023		2024		2025										
										Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.		Targ et	Rp.						
Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat Yang Tinggi	1. Meningkatkan akses/ mutu pelayanan kesehatan masyarakat	X X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase penyelenggara nya penunjang urusan dinas kesehatan	100	-	100	111972	100	123	100	144	100	155	100	166								
									X X	XX	1	2	10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Puskesmas BLUD	100	-	100	111,972	100	123	100	144	100	155	100	166	
									X X	XX	1	2	10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas BLUD	-	-	18	111,972	20	123	20	144	21	155	22	166
															1	2	2	1.	2.	3	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGA N DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	90	25,092	95	96,832	100	106,535

Tujuan	sasaran	KODE						Program, kegiatan, sub kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Cakupan Awal Program										Pj / Lokasi		
										Target		Target		Target		Target		Target			Kinerja Akhir Renstra	
										2021		2022		2023		2024		2025				
										Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.		Targ et	Rp.
		1	2	2	2	1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penyediaan layanan kesehatan	100	24,315	100	95,825	100	105,430	100	105,448	100	105,465	100	105,483		
		1	2	2	2	2	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Cakupan Puskesmas yang melakukan pengelolaan yankes Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	-	0	100	178	100	196	100	214	100	231	100	249	
		1	2	2	2	2	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Cakupan masyarakat yang mendapatkan jaminan kesehatan	90	17,857	90	89,190	100	98,130	100	98,130	100	98,130	100	98,130	
		1	2	2	2	2	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Cakupan RS yang operasional	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	
		1	2	2	2	2	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan Operasional Puskesmas	18	6,458	100	6,458	100	7,104	100	7,104	100	7,104	100	7,104	

Tujuan	sasaran	KODE						Program, kegiatan, sub kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Cakupan Awal Program										Pj / Lokasi			
										Target		Target		Target		Target		Target			Kinerja Akhir Renstra		
										2021		2022		2023		2024		2025					
										Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.		Targ et	Rp.	
		1	2	2	2	2	3 4	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Cakupan Operasional fasilitas kesehatan lainnya	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-				
		1	2	2	2	2	3 5	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Cakupan Puskesmas Terakreditasi	94	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-		
		1	2	2	2	2	3 8	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Cakupan RS Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-		
		1	2	2	2	3		Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	Cakupan puskesmas yang menggunakan sistem informasi kesehatan	100	268	100	237	100	261	100	422	100	344	100	388		
		1	2	2	2	3	1	Pengelolaan data dan informasi kesehatan	Cakupan Dokumen data dan informasi kesehatan	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0		

Tujuan	sasaran	KODE						Program, kegiatan, sub kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Cakupan Awal Program										Pj / Lokasi		
										Target		Target		Target		Target		Target			Kinerja Akhir Renstra	
										2021		2022		2023		2024		2025				
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
		1	2	2	2	3	2	Pengelolaan sistem informasi kesehatan	Cakupan Puskesmas melaksanakan pengelolaan sistem informasi kesehatan	100	268	100	237	100	261	100	322	100	344	100	388	
		1	2	2	2	3	1	Pengadaan alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet	Cakupan Pengadaan alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet	-	0	-	0	-	0	100	100	-	0	-	0	
		1	2	2	2	4		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	509	100	772	100	844	100	937	100	7014	100	1058	

Tujuan	sasaran	KODE						Program, kegiatan, sub kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Cakupan Awal Program												Pj / Lokasi
										Target		Target		Target		Target		Target		Kinerja Akhir Renstra		
										2021		2022		2023		2024		2025				
										Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Targ et	Rp.	
		1	2	2	2	4	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasyankes Lainnya	Cakupan RS melakukan pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasyankes Lainnya	100	0	100	443	100	486	100	572	100	664 4	100	688	
		1	2	2	2	4	2	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasyankes Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan RS peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasyankes	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
		1	2	2	2	4	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Cakupan peningkatan mutu pelayanan Pusk dan RS	100	106	100	189	100	208	100	215	100	220	100	220	
		1	2	2	2	4	4	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Cakupan yang melaksanakan fasilitas rujukan	25	403	25	140	25	150	25	150	25	150	25	150	

Tujuan	sasaran	KODE						Program, kegiatan, sub kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Cakupan Awal Program										Pj / Lokasi		
										Target		Target		Target		Target		Target			Kinerja Akhir Renstra	
										2021		2022		2023		2024		2025				
										Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.		Targ et	Rp.
Trwujud nya Derajat Keseha tan Masyara kat Yang Tinggi	2. Peningka tan Penangan ana n Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	1	2	2				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGA N DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100	6264	100	7598	100	8381	100	8935	100	9526	100	10157	
		1	2	2	2	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/K ota	Persentase penyediaan layanan kesehatan	100	6264	100	7598	100	8381	100	8935	100	9526	100	10157	
		1	2	2	2	2	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Cakupan warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	414	100	414	100	455	100	510	100	520	100	540	
		1	2	2	2	2	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Cakupan penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100	98	100	300	100	330	100	360	100	420	100	440	

Tujuan	sasaran	KODE						Program, kegiatan, sub kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Cakupan Awal Program										Pj / Lokasi		
										Target		Target		Target		Target		Target			Kinerja Akhir Renstra	
										2021		2022		2023		2024		2025				
										Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.		Targ et	Rp.
		1	2	2	2	2	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita DM	Cakupan penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	94	100	220	100	242	100	284	100	368	100	436	
		1	2	2	2	2	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan ODGJ	Cakupan ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	0	100	0	100	650	100	650	100	650	100	650	
		1	2	2	2	2	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Cakupan Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100	165	100	567	100	634	100	668	100	736	100	772	
		1	2	2	2	2	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Cakupan orang berisiko terinfeksi HIV mnendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100	360	100	545	100	590	100	680	100	760	100	820	

Tujuan	sasaran	KODE						Program, kegiatan, sub kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Cakupan Awal Program										Pj / Lokasi		
										Target		Target		Target		Target		Target			Kinerja Akhir Renstra	
										2021		2022		2023		2024		2025				
										Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.		Targ et	Rp.
		1	2	2	2	2	1 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat pada saat KLB	N/A	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		1	2	2	2	2	1 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat pada saat Bencana Alam	N/A	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		1	2	2	2	2	2 0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan pengelolaan Surveilans Kesehatan	100	377	100	689	100	759	100	759	100	#R EF!	100	759	
		1	2	2	2	2	2 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Cakupan Puskesmas melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	100	643	100	650	100	50	100	75	100	75	100	100	

Tujuan	sasaran	KODE						Program, kegiatan, sub kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Cakupan Awal Program										Pj / Lokasi			
										Target		Target		Target		Target		Target			Kinerja Akhir Renstra		
										2021		2022		2023		2024		2025					
										Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.		Targ et	Rp.	
		1	2	2	2	2	2	3	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Cakupan Puskesmas Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	NA	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		1	2	2	2	2	2	4	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat pasca krisis	N/A	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		1	2	2	2	2	2	5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100	4,113	100	4,113	100	4,471	100	4,699	100	4,938	100	5,265	
		1	2	2	2	2	2	7	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Cakupan puskeams melakukan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	100	0	100	0	100	50	100	75	100	100	100	150	
		1	2	2	2	2	2	8	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium	Cakupan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke	N/A	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	

Tujuan	sasaran	KODE						Program, kegiatan, sub kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Cakupan Awal Program										Pj / Lokasi		
										Target		Target		Target		Target		Target			Kinerja Akhir Renstra	
										2021		2022		2023		2024		2025				
										Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.		Targ et	Rp.
							Rujukan/Nasional	Laboratorium Rujukan/Nasional														
		1	2	2	2	2	31	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah Pengelolaan Penelitian Kesehatan	5	0	5	100	5	150	5	175	5	200	5	225	
		1	2	2	2	2	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (KIPI dan Pemberian Obat Massal)	Cakupan kasus dilakukan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (KIPI dan Pemberian Obat Massal)	N/A	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
		1	2	2	2	2	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Cakupan kasus dilakukan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	N/A	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat Yang Tinggi	3. Pemerataan akses pelayanan kesehatan sesuai standar	1	2	2				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	80	74,674	85	70,696	90	131,983	95	104,895	97	131,150	100	166,005	

Tujuan	sasaran	KODE						Program, kegiatan, sub kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Cakupan Awal Program										Pj / Lokasi		
										Target		Target		Target		Target		Target			Kinerja Akhir Renstra	
										2021		2022		2023		2024		2025				
										Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.		Targ et	Rp.
		1	2	2	2	1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan	80	72,179	85	65,937	90	126,843	95	99,550	97	125,600	99	160,150		
		1	2	2	2	1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	-	0	-	0	1	32,000	-	0	-	0	1	32,000		
		1	2	2	2	1	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pembangunan Puskesmas	-	0	-	0	1	5,000	-	0	1	5,000	-	0		
		1	2	2	2	1	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	0	-	0	1	500	-	0	-	500	-	0		
		1	2	2	2	1	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	-	0	-	0	1	5000	1	500	1	500	1	500		
		1	2	2	2	1	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Pengembangan Rumah Sakit	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		

Tujuan	sasaran	KODE						Program, kegiatan, sub kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcame) dan Kegiatan (Output)	Data Cakupan Awal Program										Pj / Lokasi		
										Target		Target		Target		Target		Target			Kinerja Akhir Renstra	
										2021		2022		2023		2024		2025				
										Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.		Targ et	Rp.
		1	2	2	2	1	6	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Pengembangan Puskesmas	-	0	-	0	-	0	1	2,000	-	0	1	2,000	
		1	2	2	2	1	7	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	1	500	
		1	2	2	2	1	8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	-	0	-	0	-	0	1	2,000	-	0	-	0	
		1	2	2	2	1	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	18	0	18	0	20	5,000	20	5,000	21	5,000	22	5,000	
		1	2	2	2	1	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	0	-	0	-	0	1	500	-	0	1	500	
		1	2	2	2	1	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	-	0	-	0	20	1,000	20	1,000	21	1,000	22	1,000	
		1	2	2	2	1	12	Pengadaan Sarana Fasilitas	Jumlah Pengadaan Sarana Fasilitas	20	27,807	20	27,807	20	30,000	20	32,000	20	34,000	20	36,000	

Tujuan	sasaran	KODE						Program, kegiatan, sub kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcame) dan Kegiatan (Output)	Data Cakupan Awal Program										Pj / Lokasi			
										Target		Target		Target		Target		Target			Kinerja Akhir Renstra		
										2021		2022		2023		2024		2025					
										Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.		Targ et	Rp.	
							Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Kesehatan															
		1	2	2	2	1	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1	2,796	1	2,800	1	2,980	1	3,000	1	3,000	1	3,000		
		1	2	2	2	1	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Set Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	50	41,576	50	35,330	50	38,863	50	47,000	50	50,000	50	52,000		
		1	2	2	2	1	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	-	0	-	0	5	1,000	5	1,000	5	1,000	5	1,000		
		1	2	2	2	1	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	0	-	0	20	2,000	20	2,000	21	22,000	22	23,000		
		1	2	2	2	1	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas	Jumlah Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung	-	0	-	0	1	3,000	1	3,000	1	3,000	1	3,000		

Tujuan	sasaran	KODE						Program, kegiatan, sub kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Cakupan Awal Program										Pj / Lokasi			
										Target		Target		Target		Target		Target			Kinerja Akhir Renstra		
										2021		2022		2023		2024		2025					
										Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.		Targ et	Rp.	
							Pelayanan Kesehatan	Fasilitas Pelayanan Kesehatan															
		1	2	2	2	1	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah unit Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	0	-	0	25	500	30	550	40	600	50	650		
Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat Yang Tinggi	4. Optimalisasi sistem manajemen obat dan BHP, pengawasan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, Optikal dan UMOT	1	2	2				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	80	2495	85	4759	90	5140	95	5345	95	5550	95	5855		
		1	2	2	2	1		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan	80	2,495	85	4,759	90	5,100	95	5,300	95	5,500	95	5,800		
		1	2	2	2	1	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Cakupan Pengadaan Obat, Vaksin	80	1,169	85	3,433	90	3,600	95	3,700	95	3,800	95	4,000		

Tujuan	sasaran	KODE						Program, kegiatan, sub kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Cakupan Awal Program												Pj / Lokasi
										Target		Target		Target		Target		Target		Kinerja Akhir Renstra		
										2021		2022		2023		2024		2025				
										Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Targ et	Rp.	
		1	2	2	2	1	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Cakupan Pengadaan Bahan Habis Pakai	80	1,326	85	1,326	90	1,500	95	1,600	95	1,700	95	1,800	
		1	2	2	2	1		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Telemedicine di Fasyankes	100	0	100	0	100	40	100	45	100	50	100	55	
		1	2	2	2	2	30	Penyediaan Telemedicine di Fasyankes	Cakupan Puskesmas Penyediaan Telemedicine di Fasyankes	-	0	-	0	100	40	100	45	100	50	100	55	
		1	2	4				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase penyediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	80	246	85	420	90	479	95	575	95	645	95	725	

Tujuan	sasaran	KODE						Program, kegiatan, sub kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Cakupan Awal Program												Pj / Lokasi
										Target		Target		Target		Target		Target		Kinerja Akhir Renstra		
										2021		2022		2023		2024		2025				
										Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Targ et	Rp.	
		1	2	4	2	1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	80	246	85	420	90	479	95	575	95	645	95	725		
		1	2	4	2	1	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizin an Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tra disional (UMOT).	Cakupan puskesmas melakukan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizin an Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tra disional (UMOT).	100	197	100	345	100	379	100	400	100	420	100	450	

Tujuan	sasaran	KODE						Program, kegiatan, sub kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Cakupan Awal Program										Pj / Lokasi		
										Target		Target		Target		Target		Target			Kinerja Akhir Renstra	
										2021		2022		2023		2024		2025				
										Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.		Targ et	Rp.
		1	2	4	2	1	2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah sanana Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	105	49	105	75	105	100	110	125	115	150	120	175	
		1	2	4	2	1	3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin	-	0	-	0	-	0	110	50	115	75	120	100	

Tujuan	sasaran	KODE						Program, kegiatan, sub kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcame) dan Kegiatan (Output)	Data Cakupan Awal Program										Pj / Lokasi		
										Target		Target		Target		Target		Target			Kinerja Akhir Renstra	
										2021		2022		2023		2024		2025				
										Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.		Targ et	Rp.
		1	2	4	2	2	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Rumah Tangga bersertifikat	Cakupan Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Rumah Tangga bersertifikat	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	100	0		
		1	2	4	2	2	1	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Rumah Tangga	Jumlah Unit Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Rumah Tangga	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	

Tujuan	sasaran	KODE						Program, kegiatan, sub kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Cakupan Awal Program										Pj / Lokasi		
										Target		Target		Target		Target		Target			Kinerja Akhir Renstra	
										2021		2022		2023		2024		2025				
										Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.		Targ et	Rp.
		1	2	4	2	2	2	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Unit Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat Yang Tinggi	5. Optimalisasi manajemen SDM Kesehatan	1	2	3				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	100	12,666	100	336	100	569	100	587	100	619	100	688	
		1	2	3	2	1		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan	40%	59	45%	144	46%	358	47%	365	48%	375	50%	400	
		1	2	3	2	1	1	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Nakes dilakukan pengendalian perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	-	0	-	0	50	200	100	200	150	200	200	200	

Tujuan	sasaran	KODE						Program, kegiatan, sub kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Cakupan Awal Program										Pj / Lokasi		
										Target		Target		Target		Target		Target			Kinerja Akhir Renstra	
										2021		2022		2023		2024		2025				
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
		1	2	3	2	1	2	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik nakes.	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik nakes.	40%	59	45%	144	46 %	158	47 %	165	48 %	175	50%	200	
		1	2	3	2	2		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Cakupan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	100	12,503	100	14,028	100	14,088	100	14,124	100	14,194	100	14,264	
		1	2	3	2	2	1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	57	1	176	1	194	1	200	1	220	1	240	

Tujuan	sasaran	KODE						Program, kegiatan, sub kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcame) dan Kegiatan (Output)	Data Cakupan Awal Program										Pj / Lokasi		
										Target		Target		Target		Target		Target			Kinerja Akhir Renstra	
										2021		2022		2023		2024		2025				
										Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.		Targ et	Rp.
		1	2	3	2	2	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	152	12,204	152	13,424	152	13,424	152	13,424	152	13,424	152	13,424	
		1	2	3	2	2	3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah nakes dilakukan pembinaan dan pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	666	242	666	428	666	470	666	500	666	550	666	600	
		1	2	3	2	3		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	40%	104	45%	192	46%	211	47%	222	48%	244	50%	288	

Tujuan	sasaran	KODE						Program, kegiatan, sub kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Cakupan Awal Program												Pj / Lokasi
										Target		Target		Target		Target		Target		Kinerja Akhir Renstra		
										2021		2022		2023		2024		2025				
										Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Targ et	Rp.	
		1	2	3	2	3	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nakes dilakukan pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	585	104	585	192	585	211	585	222	585	244	585	288	
Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat Yang Tinggi	6. Peningkatan Pemerataan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1	2	2				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100	3,339	100	3,159	100	4,501	100	3,660	100	3,705	100	4,770	
		1	2	2	2	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100	3,339	100	3,159	100	4,501	100	3,660	100	3,705	100	4,770	

Tujuan	sasaran	KODE						Program, kegiatan, sub kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcame) dan Kegiatan (Output)	Data Cakupan Awal Program										Pj / Lokasi		
										Target		Target		Target		Target		Target			Kinerja Akhir Renstra	
										2021		2022		2023		2024		2025				
										Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.		Targ et	Rp.
		1	2	2	2	2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	100	264	100	204	100	226	100	300	100	300	100	300	
		1	2	2	2	2	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100	127	100	243	100	267	100	300	100	300	100	300	
		1	2	2	2	2	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	11,044	27	11,265	36	11,470	39	11,720	42	11,720	45	11,720	48	
		1	2	2	2	2	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	100%	504	100%	504	100%	550	100%	550	100%	550	100%	550	
		1	2	2	2	2	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar sesuai standar	100%	96	100%	155	100%	170	100%	185	100%	190	100%	200	
		1	2	2	2	2	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut sesuai standar	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut sesuai standar	100%	75	100%	96	100%	106	100%	115	100%	125	100%	150	

Tujuan	sasaran	KODE						Program, kegiatan, sub kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Cakupan Awal Program												Pj / Lokasi	
										Target		Target		Target		Target		Target		Kinerja Akhir Renstra			
										2021		2022		2023		2024		2025					
										Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Targ et	Rp.		
		1	2	2	2	2	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100	1,490	100	1,490	100	1,639	100	1,650	100	1,680	100	1,710		
		1	2	2	2	2	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan olah raga	Cakupan Puskesmas yang melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan olah raga	100	106	100	110	100	110	100	110	100	110	100	110		
		1	2	2	2	2	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100	163	100	250	100	1325	100	350	100	350	100	1350		
		1	2	2	2	2	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan Puskesmas Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	100	0	100	50	100	75	100	100	100	100	100	100	100	
		1	2	2	2	2	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Kecamatan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	5	641	6	300	7	300	8	300	9	300	11	300		

Tujuan	sasaran	KODE					Program, kegiatan, sub kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Cakupan Awal Program										Pj / Lokasi		
									Target		Target		Target		Target		Target			Kinerja Akhir Renstra	
									2021		2022		2023		2024		2025				
									Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.		Targ et	Rp.
		1	2	4			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase penyediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	-	0	50	226	60	313	70	580	80	605	90	635	
		1	2	4	2	3	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Cakupan Pemberian Sertifikat P-IRT dan Nomor P-IRT	-	0	55%	107	60%	118	65%	365	70%	370	75%	385	

Tujuan	sasaran	KODE						Program, kegiatan, sub kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Cakupan Awal Program												Pj / Lokasi
										Target		Target		Target		Target		Target		Kinerja Akhir Renstra		
										2021		2022		2023		2024		2025				
										Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Targ et	Rp.	
		1	2	4	2	3	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah P-IRT dilakukkann pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-	0	358	107	358	118	358	365	358	370	358	385	

Tujuan	sasaran	KODE					Program, kegiatan, sub kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcame) dan Kegiatan (Output)	Data Cakupan Awal Program												Pj / Lokasi	
									Target		Target		Target		Target		Target		Kinerja Akhir Renstra			
									2021		2022		2023		2024		2025					
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		1	2	4	2	4	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Cakupan Pemberian Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	-	0	50	119	56	125	62	135	68	145	74	150		
		1	2	4	2	4	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah TPM dilakukan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-	0	59	119	65	125	75	135	85	145	95	150	

Tujuan	sasaran	KODE						Program, kegiatan, sub kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Cakupan Awal Program										Pj / Lokasi		
										Target		Target		Target		Target		Target			Kinerja Akhir Renstra	
										2021		2022		2023		2024		2025				
										Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.		Targ et	Rp.
		1	2	4	2	5		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Cakupan Pemberian Stiker	-	-	-	-	56	75	62	100	68	125	74	150	
		1	2	4	2	5	1	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Produk Makanan Jajanan yang dilakukan pembinaan dan Pengawasan	-	-	-	-	25	75	30	100	35	125	40	150	
		1	2	4	2	6		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-	-	-	-	10	70	20	80	30	90	40	100	

Tujuan	sasaran	KODE						Program, kegiatan, sub kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Cakupan Awal Program										Pj / Lokasi		
										Target		Target		Target		Target		Target			Kinerja Akhir Renstra	
										2021		2022		2023		2024		2025				
										Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.		Targ et	Rp.
		1	2	4	2	6	1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Post Market yang dilakukan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	-	-	-	-	10	35	20	40	30	45	40	50	
		1	2	4	2	6	2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah P-IRT yang dilakukan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	-	-	-	-	10	35	20	40	30	45	40	50	
		1	2	5				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100	515	100	865	100	1024	100	1085	100	1120	100	1120	

Tujuan	sasaran	KODE						Program, kegiatan, sub kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Cakupan Awal Program												Pj / Lokasi
										Target		Target		Target		Target		Target		Kinerja Akhir Renstra		
										2021		2022		2023		2024		2025				
										Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Targ et	Rp.	
		1	2	5	2	1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	100	280	100	414	100	454	100	460	100	470	100	470		
		1	2	5	2	1	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	100	280	100	414	100	454	100	460	100	470	100	470	
		1	2	5	2	2		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif	10	235	10	451	10	470	10	500	10	500	10	500	
		1	2	5	2	2	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan	Cakupan rumah ber-PHBS	10	235	15	451	20	470	25	500	30	500	35	500	

Tujuan	sasaran	KODE					Program, kegiatan, sub kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcame) dan Kegiatan (Output)	Data Cakupan Awal Program										Pj / Lokasi						
									Target		Target		Target		Target		Target			Kinerja Akhir Renstra					
									2021		2022		2023		2024		2025								
									Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.		Targ et	Rp.				
							Hidup Bersih dan Sehat																		
		1	2	5	2	3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	0	-	0	32	100	40	125	42	150	42	150					
		1	2	5	2	3	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	0	-	0	32	100	40	125	42	150	42	150				

Tujuan	sasaran	KODE						Program, kegiatan, sub kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Cakupan Awal Program										Pj / Lokasi		
										Target		Target		Target		Target		Target			Kinerja Akhir Renstra	
										2021		2022		2023		2024		2025				
										Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.		Targ et	Rp.
Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat Yang Tinggi	7. Peningkatan kualitas capaian kinerja pegawai dan manajemen keuangan	1	2					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase peningkatan kinerja penunjang urusan dinas kesehatan	100	92,073	100	99,496	100	104,241	100	104,266	100	104,291	100	104,316	
		1	2	1	2	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	90	312	95	715	95	750	95	775	97	800	99	825	
		1	2	1	2	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	3	144	3	330	3	350	3	350	3	350	3	350	
		1	2	1	2	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Cakupan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
		1	2	1	2	1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Cakupan dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
		1	2	1	2	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Cakupan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	100	168	100	385	100	400	100	425	100	450	100	475	

Tujuan	sasaran	KODE						Program, kegiatan, sub kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Cakupan Awal Program										Pj / Lokasi			
										Target		Target		Target		Target		Target			Kinerja Akhir Renstra		
										2021		2022		2023		2024		2025					
										Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.		Targ et	Rp.	
							Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Realisasi Kinerja SKPD															
		1	2	1	2	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-		
		1	2	1	2	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan	100	84,821	100	90,000	100	95,000	100	95,000	100	95,000	100	95,000		
		1	2	1	2	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1	84,821	1	90,000	1	95,000	1	95,000	1	95,000	1	95,000		
		1	2	1	2	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cakupan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-		
		1	2	1	2	2	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Cakupan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-		

Tujuan	sasaran	KODE						Program, kegiatan, sub kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Cakupan Awal Program												Pj / Lokasi
										Target		Target		Target		Target		Target		Kinerja Akhir Renstra		
										2021		2022		2023		2024		2025				
										Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Targ et	Rp.	
		1	2	1	2	3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kualitas Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	1,269	100	1,269	100	1,300	100	1,300	100	1,300	100	1,300	
		1	2	1	2	3	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (tenaga keamanan kantor)	Jumlah tenaga keamanan kantor	61	1,171	63	1,171	65	1,200	65	1,200	65	1,200	65	1,200	
		1	2	1	2	3	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	7	98	7	98	7	100	7	100	7	100	7	100	
		1	2	1	2	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90	521	91	521	92	200	93	200	94	200	95	200	
		1	2	1	2	5	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Cakupan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	

Tujuan	sasaran	KODE						Program, kegiatan, sub kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcame) dan Kegiatan (Output)	Data Cakupan Awal Program										Pj / Lokasi		
										Target		Target		Target		Target		Target			Kinerja Akhir Renstra	
										2021		2022		2023		2024		2025				
										Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.		Targ et	Rp.
		1	2	1	2	5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	150	351	150	351	360	150	360	150	360	150	360	150	
		1	2	1	2	5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah ASN yang mendapatkan Bimbingan Teknis Implementa	50	170	50	170	180	50	180	50	180	50	180	50	
		1	2	1	2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	1,179	100	1,754	100	1,754	100	1,754	100	1,754	100	1,754	
		1	2	1	2	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (unit)	6	30	6	80.1	6	80.1	6	80.1	6	80.1	6	80.1	
		1	2	1	2	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Item)	21	460	21	736.9	21	736.9	21	736.9	21	736.9	21	736.9	

Tujuan	sasaran	KODE						Program, kegiatan, sub kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Cakupan Awal Program										Pj / Lokasi				
										Target		Target		Target		Target		Target			Kinerja Akhir Renstra			
										2021		2022		2023		2024		2025						
										Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.		Targ et	Rp.		
		1	2	1	2	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan makan dan mibum kantor (Porsi)	732	34	732	70.2	732	70.2	732	70.2	732	70.2	732	70.2			
		1	2	1	2	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Juumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Item)	5	85	5	166.7	5	166.7	5	166.7	5	166.7	5	166.7	5	166.7	
		1	2	1	2	6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar/ majalah	6	40	6	40	6	40	6	40	6	40	6	40	6	40	
		1	2	1	2	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas Bimtek dan Koordinasi (Kali)	550	530	550	660	550	660	550	660	550	660	550	660	550	660	
		1	2	1	2	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
		1	2	1	2	7	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Cakupan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	

Tujuan	sasaran	KODE						Program, kegiatan, sub kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Cakupan Awal Program										Pj / Lokasi		
										Target		Target		Target		Target		Target			Kinerja Akhir Renstra	
										2021		2022		2023		2024		2025				
										Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.		Targ et	Rp.
							Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan														
		1	2	1	2	7	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
		1	2	1	2	7	5	Pengadaan Mebel	Cakupan Pengadaan Mebel	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
		1	2	1	2	7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
		1	2	1	2	7	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
		1	2	1	2	7	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	

Tujuan	sasaran	KODE						Program, kegiatan, sub kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Cakupan Awal Program										Pj / Lokasi		
										Target		Target		Target		Target		Target			Kinerja Akhir Renstra	
										2021		2022		2023		2024		2025				
										Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.		Targ et	Rp.
		1	2	1	2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	2,192	100	2,915	100	2,915	100	2,915	100	2,915	100	2,915	
		1	2	1	2	8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan penyediaan jasa surat menyurat	100	903	100	903	100	903	100	903	100	903	100	903	
		1	2	1	2	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	579	100	978	100	978	100	978	100	978	100	978	
		1	2	1	2	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	710	100	1034	100	1034	100	1034	100	1034	100	1034	
		1	2	1	2	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	1,782	100	2,322	100	2,322	100	2,322	100	2,322	100	2,322	

Tujuan	sasaran	KODE						Program, kegiatan, sub kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Cakupan Awal Program										Pj / Lokasi				
										Target		Target		Target		Target		Target			Kinerja Akhir Renstra			
										2021		2022		2023		2024		2025						
										Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.		Targ et	Rp.		
		1	2	1	2	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan peningkatan penyediaan jasa, pemeriharaan dan pajak kendaraan kantor	100	478	100	500	100	500	100	500	100	500	100	500			
		1	2	1	2	9	9	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan emeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	1059	100	1322	100	1322	100	1322	100	1322	100	1322	100	1322	
		1	2	1	2	9	10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	127 unit	245	127 unit	500	127 unit	500	127 unit	500	127 unit	500	127 unit	500	127 unit	500	

Tabel 6.2
Keterkaitan, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Program

RPJMD 2021-2026					RENSTRA DISKES 2021-2026		
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG
Meningkatkan Kapasitas dan Kemampuan Keuangan Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia serta Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.	Peningkatan jumlah, kapasitas dan kualitas tenaga kesehatan.	Meningkatkan jumlah, kapasitas dan kualitas tenaga kesehatan.	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	Bidang Sumber Daya Kesehatan
			Penyediaan dokter untuk seluruh puskesmas pembantu di Kabupaten Bengkalis	Menyediakan dokter untuk seluruh puskesmas pembantu di Kabupaten Bengkalis.		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia	Sekretariat
			Peningkatan akses kesehatan bagi masyarakat.	Meningkatkan akses kesehatan bagi masyarakat.	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan.	Bidang Sumber Daya Kesehatan
			Pemberian Jaminan Kesehatan Total (100%) Bagi Masyarakat	Memberikan Jaminan Kesehatan Total (100%) Bagi Masyarakat.	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jaminan Kesehatan Total Masyarakat	Bidang Pelayanan Kesehatan
			Optimalisasi Posyandu dan Pelayanan Kesehatan dalam Menangani Stunting serta Penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Mengoptimalkan Posyandu dan Pelayanan Kesehatan dalam Menangani Stunting serta Penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Penanggulangan Gizi Buruk, Gizi Kurang, Balita Stunting. Rumah Tangga Ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Bidang Kesehatan Masyarakat Bidang Kesehatan Masyarakat

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAN DINAS KESEHATAN

Kinerja adalah pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (Lima) tahunan, sedangkan indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

1.1 INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.

Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi OPD yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD;
- 2) Identifikasi indikator dan target kinerja OPD yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Dinas Kesehatan menjadi pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dari indikator kinerja program (outcome) Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis termasuk indikator kinerja utama untuk penetapan kinerja. Lebih jelas dan rinci indikator kinerja Dinas Kesehatan pada tabel 7.1 dan indikator kinerja mengacu pada sasaran dan tujuan RPJMD pada tabel 7.2 sedangkan indikator kinerja utama dapat dilihat pada tabel 7.3

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Angka Harapan Hidup (AHH)	-	71,2	71,36	71,55	71,71	71,86	72,03	72,2
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1000	4	3,7	3,5	3,2	2,7	2,4	2
3	Angka Kematian Balita (AKB)	Per 1000	4,1	3,7	3,4	3	3	2,8	2,5
4	Angka Kematian Neonatal	Per 1000	3,6	3,2	3	2,7	2,4	2,1	2
5	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000	201	191	181	172	164	156	148
6	Persentase Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	%	20	20	17	15	14	12	10
7	Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)	Per 100.000	65	65	65	65	65	65	65
8	Angka kesakitan malaria	Per 1000	<1	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
9	Angka kesembuhan penderita TB dan paru	Angka	376	376	414	456	546	546	546
10	Prevalensi HIV	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
11	Rasio Posyandu Per Balita	%	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6
12	Rasio Puskesmas per penduduk	%	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5

No	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
13	Rasio Pustu Per Penduduk	%	15	16	17	18	19	20	21
14	Rasio Rumah Sakit Per Penduduk	%	2	2	2	2	2	2	2
15	Mayarakat yang memiliki jaminan kesehatan	%	79	90	95	100	100	100	100
16	Puskesmas Terakreditasi	%	90	17	18	20	20	21	22
17	Persentase puskesmas memiliki peralatan kesehatan sesuai standar	%	N/A	70	80	85	90	95	100
18	Rasio dokter per satuan penduduk :								
	Dokter Umum	Per 1000	47	48	49	50	51	52	53
	Dokter Spesialis	Per 1000	13	14	15	16	17	18	19
	Dokter umum	Per 1000	15	15	16	17	18	19	20
19	Rasio tenaga medis per satuan penduduk :								
	Bidan	Per 1000	120	125	130	135	140	145	150
	Perawat	Per 1000	130	135	140	145	150	155	160
	Apoteker	Per 1000	12	13	14	15	16	17	18
	Ahli Gizi	Per 1000	13	14	15	16	17	18	19
	Kesmas	Per 1000	16	17	18	19	20	21	22
	Sanitarian	Per 1000	12	13	14	15	16	17	18

BAB VII

PENUTUP

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan sejak periode Tahun 2021 memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Perubahan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan serta pagu pendanaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan. Renstra merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 dan pelaksanaan tahap kelima Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkalis 2005 – 2025.

Rencana lima tahunan yang tertuang dalam perubahan Renstra merupakan pedoman penyusunan Renja, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan tersusunnya Renstra diharapkan nantinya pelaksanaan kegiatan dapat lebih tepat, berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga arah pembangunan kesehatan lebih jelas sesuai Visi dan Misi serta tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis.

Untuk melihat keberhasilan pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja telah ditetapkan, program dan kegiatan prioritas yang telah disusun melalui indikator kinerja utama sebagai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis.

Bengkalis, Maret 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BENGKALIS



Dr. ERSAN SAPUTRA, TH
Pembina Tingkat I
Nip. 19740220 200312 1 007

